

**TINJAUAN *MAQASHID ASY-SYARI'AH* TERHADAP
KETENTUAN SERTIFIKASI DAN SAKSI IKRAR WAKAF MENURUT PASAL 218
AYAT (1) KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Disusun Guna Tugas Dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



Disusun oleh :
Muhammad Sahal Mahfud
1502016152

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2021**

Dr. Mahsun, M.Ag.

NIP. 196711132005011001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 1 (Satu) Bandel

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Muhammad Sahal Mahfud

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Sahal Mahfud

NIM : 1502016152

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **“TINJAUAN MAQASHID ASY-SYARI’AH TERHADAP KETENTUAN
SERTIFIKASI DAN SAKSI IKRAR WAKAF MENURUT PASAL 218
AYAT (1) KOMPILASI HUKUM ISLAM”**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 Maret 2021

Pembimbing



Dr. Mahsun, M.Ag.

NIP. 196711132005011001

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B- 1504.4/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XI/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Muhammad Sahal Mahfud
Nim : 1502016152
Program studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul skripsi : "TINJAUAN MAQASHID ASY-SYARI'AH TERHADAP
KETENTUAN SERTIFIKASI DAN SAKSI IKRAR WAKAF MENURUT PASAL 218 AYAT (1)
KOMPILASI HUKUM ISLAM"
Nama pembimbing : Dr. Mahsun, M.Ag.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 26 April 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua Sidang / Penguji : Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.
Sekretaris Sidang / Penguji : Dr. MAHSUN, M.Ag.
Penguji Utama I : Drs. H. MAKSUN, M.Ag.
Penguji Utama II : MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H.

Dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.I) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 26 April 2021

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam,




NUR HIDAYATI-SETYANI

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". (Q.S Ali Imran ayat 92).¹

– أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْرٍ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا , فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا , فَتَصَدَّقَ عُمَرُ يُبَاغِ أَصْلَهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ , فِي الْفُقَرَاءِ وَالْأُزْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ , لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Umar Radhiyallahu ‘anhu telah memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, seraya berkata, "Aku telah mendapatkan bagian tanah, yang saya tidak memperoleh harta selain ini yang aku nilai paling berharga bagiku. Maka bagaimana engkau, wahai Nabi? Engkau memerintahkan aku dengan sebidang tanah ini?" Lalu Beliau menjawab, "Jika engkau menghendaki, engkau wakafkan tanah itu (engkau tahan tanahnya) dan engkau shadaqahkan hasilnya," lalu Umar menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwaris, tetapi diinfakkan hasilnya untuk fuqara, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah, untuk menjamu tamu dan untuk ibnu sabil. Orang yang mengurusinya, tidak mengapa apabila dia makan sebagian hasilnya menurut yang makruf, atau memberi makan temannya tanpa ingin menimbunnya. [HR Bukhari no. 2565, Muslim 3085].²

¹ Departemen Agama RI

² Shahih Muslim Hadits Nomor 3085.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang semoga kita semuanya mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat nanti. Dengan mengharap rahmat dan taufik dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:


1. Kedua orang tua tercinta Bapak Asmawi dan Ibu Siti Munasiroh serta Adik perempuan saya yang paling cantik Sifa Aulia Salsabila yang telah mendukung secara materi dan moral beserta do'anya kepada penulis sehingga penulis termotivasi untuk semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
2. Segenap keluarga besar Mbah yusman yang selalu memberikan suport mulai dari awal kuliah sampai tahap aKHiR ini.
3. Untuk kakak sepupu saya mas Gani, mas Zaka, Mbak fakhrun dan sikecil faza almaira az-zahra yang sudah memberikan masukan serta semangat sehingga penulis mampu untuk melewati masa-masa awal perkuliahan hingga saat ini.
4. Segenap para Guru dan juga para Dosen yang selalu memberikan bimbingan kepada saya untuk selalu giat dalam belajar.
5. Kepada sahabat saya mas cecak, kutil, acil, warobe, sri widarti, miranda, yupi, mas ogi dan anggota RW 8 yang selalu memberikan dukungan dari sejak awal masuk kuliah sampai tahap aKHiR ini.
6. Sahabat "*Nganu*" yaitu mbak wulan, mujibur rohman dan siti mahfudoh yang selalu menjadi sahabat dalam suka dan duka yang selalu menghibur penulis disaat penatnya proses penulisan skripsi ini.
7. Sahabat kecil saya Ahmad mahsun, Toyeng dan segenap keluarga besar IRMAROUS yang selalu menemani penulis dari sejak kecil sampai saat ini yang selalu mensuport kuliah saya.
8. Teman-teman WSC yang sudah menjadi kayak saudara sendiri Mas Ipung, Mas kholiq dan Mas fatih.
9. Para senior WSC saya Mas juplek, Gus fadli, Mas Jengki dan Mas Faris yang telah memberikan ilmunya yang begitu luar biasa kepada saya.
10. Rekan-rekan KKN dari Posko 67 KKN MIT UIN Walisongo Tahun 2019 Kelurahan Tlogosari Wetan Kec. Pedurungan, Kota Semarang.
11. Segenap keluarga besar UKM WSC dan juga para veteran.
12. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, semoga Allah selalu memberikan limpahan keberkahan kepada kalian semua.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 31 Maret 2021

Deklarator



Muhammad Sahal Mahfud
NIM. 1502016152

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Tinjauan *Maqashid Asy-Syari’ah* Terhadap Ketentuan Sertifikasi Dan Saksi Ikrar Wakaf Menurut Pasal 218 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam”**. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta segenap para keluarga dan para sahabatnya hingga hari kiamat nanti.

Penulisan skripsi ini merupakan upaya penulis untuk mendapat gelar Sarjana Hukum dan juga merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Selanjutnya penulis ingin sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik dorongan moril maupun materiil. Selama proses pembuatan Skripsi ini penulis menyadari bahwa penulis tidak dapat terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan do’a dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Mahsun M.Ag. selaku dosen pembimbing dan dosen wali penulis skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan dan masukan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Arja’ Imroni M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani SH., MH. Dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku ketua program studi dan Sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam.
5. Segenap bapak dan Ibu dosen dan juga para staf Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan dukungan dan arahan proses belajar.
6. Dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, semoga mendapatkan balasan yang melimpah dari yang maha kuasa.

Penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga penulis dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi ini. Penulis juga berharap, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda pada semua orang yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini dan menjadikan semua bantuan sebagai ibadah serta semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aaamiin.

Semarang, 31 Maret 2021
Penulis

Muhammad Sahal Mahfud
NIM 1502016152.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S'	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	–'	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di aKHIR, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَي	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
اَو	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...ي	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
اِ...ي	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
اُ...و	<i>Dammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang beraKHIR dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ع bertasydid di aKHir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (اِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah) . Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan aKHir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafẓ Al-Jalālah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di aKHir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
MOTTO.....	IV
PERSEMBAHAN	V
DEKLARASI	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI	VIII
DAFTAR ISI	XI
ABSTRAK	XIV
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Penyajian Data.....	9
H. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II	10
KAJIAN TEORI TENTANG WAKAF DAN MAQASID ASY-SYARI'AH.....	10
A. Pengertian Wakaf	10
B. Sejarah Wakaf	11
1. Wakaf di Zaman Kesultanan	12
2. Wakaf Pada Zaman Kolonial.....	13
3. Wakaf di Zaman Kemerdekaan	16
C. Dasar Hukum Wakaf	20

1. Al-Qur'an.....	20
2. Hadits.....	20
D. Rukun dan Syarat Wakaf.....	21
E. Macam-macam Wakaf	22
1. Wakaf Ahli	22
2. Wakaf Khairi	22
F. Saksi Wakaf.....	23
G. Sertifikasi Wakaf.....	24
1. Pengertian Sertifikasi.....	24
2. Dasar Hukum Sertifikasi	25
3. Mekanisme Sertifikasi Wakaf	27
H. Pengertian Maqasid Asy-Syariah	29
I. Tujuan Maqasid Asy-Syariah	30
J. Tingkatan Maqasid Asy-Syariah	30
1. Kemaslahatan <i>Dharuriyah</i> (Primer)	30
2. Kemaslahatan <i>Hajiyah</i> (Sekunder)	30
3. Kemaslahatan <i>Tahsiniah</i> (Tersier).....	31
BAB III.....	32
KETENTUAN WAKAF DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	32
A. Kompilasi Hukum Islam	32
1. Latar Belakang Penyusunan KHI.....	32
2. Landasan dan Kedudukan KHI.....	36
3. Isi Kompilasi Hukum Islam.....	39
B. Wakaf Perspektif Kompilasi Hukum Islam.....	42
1. Ketentuan Wakaf Dalam Kompilasi Hukum Islam.	42
2. Penerapan Hukum Perwakafan dalam Kompilasi Hukum Islam.....	42
3. Tata Cara Perwakafan dan Pendaftaran Benda Wakaf	45
4. Perubahan penyelesaian dan pengawasan benda wakaf	45
BAB IV.....	50

ANALISIS PASAL 218 AYAT 1 (SATU) KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG SERTIFIKASI AKTA IKRAR WAKAF DAN SAKSI WAKAF PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH.....	50
A. Urgensi Sertifikasi Dan Saksi Ikrar Wakaf Dalam Pasal 218 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam	50
B. Sertifikasi dan saksi ikrar wakaf dalam pasal 218 ayat (1) kompilasi hukum Islam perspektif maqashid asy-syari'ah.....	53
BAB V	64
PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	70
BIOGRAFI	76

ABSTRAK

Pelaksanaan wakaf sebelum adanya kompilasi hukum Islam dilakukan secara sederhana dengan hanya memenuhi rukun wakaf menurut hukum agama Islam. Namun setelah keluarnya kompilasi hukum Islam mengatur tata cara wakaf dengan melengkapi ketentuan administratif berupa adanya sertifikasi akta ikrar wakaf dan saksi. Mayoritas dari tanah yang telah diwakafkan tidak memiliki akta ikrar wakaf, sesuai yang dicantumkan didalam pasal 218 Kompilasi Hukum Islam, Masyarakat hanya sekedar mewakafkan tanah mereka tanpa memperdulikan apakah tanah yang mereka wakafkan sudah sesuai dengan prosedur tata cara mewakafkan tanah melalui peraturan pemerintah yang dituangkan didalam undang-undang. Prinsip *maqashid asy-syari'ah* merupakan suatu muara dari segala aturan yang diciptakan termasuk sertifikasi akta ikrar wakaf.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan mengenai; apakah urgensi sertifikasi dan saksi ikrar wakaf dalam pasal 218 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana sertifikasi dan saksi ikrar wakaf dalam pasal 218 ayat (1) kompilasi hukum Islam perspektif *maqashid asy-syari'ah*.

Metode penelitian dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, yaitu jenis penelitian menggunakan sumber data primer undang-undang dan menggunakan sumber data *library research* (penelitian pustaka) untuk dikaji dalam bentuk penelitian doktrinal (*doctrinal research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sertifikasi Akta Ikrar Wakaf dan saksi mempunyai arti yang sangat penting atau urgent, karena dengan dibuatnya Akta Ikrar Wakaf, maka perwakafan tersebut akan terbukti autentik dalam akta yang akan dapat melindungi dan menjamin kesinambungan, kelestarian dan kelanggengan eksistensi wakaf itu sendiri, yang dapat dipergunakan dalam mengatasi berbagai persoalan. Sertifikasi dan saksi ikrar wakaf dalam pasal 218 ayat (1) kompilasi hukum Islam sudah sesuai dengan *maqashid asy-syari'ah* karena didalamnya mengimplementasikan dari salah satu prinsip *maqashid asy-syari'ah* yaitu menjaga harta (*hifzul mal*) serta mengedepankan aspek dari *Maslahat* yaitu memenuhi tujuan Allah Swt.

Kata kunci: Akta Ikrar wakaf, *maqashid asy-syari'ah*.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang secara konkret berhubungan erat dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Wakaf juga merupakan salah satu bentuk kontribusi lembaga Islam yang paling banyak memberikan manfaat sosial kemasyarakatan. Ia bernilai ibadah dan sebagai jalan pengabdian kepada Allah SWT.³

Dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan alat yang sangat bernilai dalam pembangunan, karena wakaf merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi yang mewakafkan. Melihat pahala yang penting dan besar, maka Rasulullah saw. menghimbau dan membimbing para shahabat agar senantiasa bersemangat untuk memberikan manfaat hartanya bagi kepentingan sosial dan kemasyarakatan, dengan berbagai contoh dan teladan, baik yang langsung maupun kehendak dan suruhannya saja.⁴

Amalan wakaf ini merupakan amalan yang telah dilembagakan dan harta benda yang telah diwakafkan tersebut digunakan untuk amal kebaikan yang terlepas dari hak milik perorangan, dan menjadi milik Allah. Maka harta yang telah dilembagakan dan menjadi milik umum tersebut penggunaannya harus disesuaikan dengan tujuan wakaf itu sendiri.

Harta wakaf pada dasarnya tidak boleh dijual, atau diberikan kepada orang lain dengan cuma-cuma yang menghilangkan kemanfaatan wakaf dan tidak boleh diwariskan bila meninggal dunia. Akan tetapi seandainya barang tersebut rusak dan tidak bisa diambil lagi manfaatnya, harta wakaf diganti dengan harta wakaf yang sama seperti harta wakaf semula. Ini didasarkan menjaga mashlahat (memelihara maksud syara', yaitu memberikan manfaat dan menghindari hal-hal yang merugikan).⁵

Pelaksanaan ibadah wakaf merupakan sebuah contoh yang kongkrit atas rasa keadilan sosial, sebab wakaf merupakan pemberian sejumlah harta benda yang sangat dicintai diberikan secara cuma-cuma untuk kebajikan umum. Sudah banyak lembaga-lembaga ekonomi yang ditawarkan oleh Islam yang merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengatasi berbagai problematika kehidupan masyarakat.⁶ Model distribusi wakaf di Indonesia selama ini masih cenderung konsumtif sehingga belum dapat dikembangkan untuk mencapai hasil yang lebih baik terlebih untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Dan sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang memerlukan, termasuk fakir dan miskin. Pemanfaatan tersebut dilihat dari

³ Imam Muslim bin al-Hajaj al-Qusyarri, *Sahih Muslim*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, tth., hlm. 123-124

⁴ *Ibid.*, hlm. 414.

⁵ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988, hlm. 85.

⁶ Kementerian Agama RI, *pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf), 2014, hlm 73

segi sosial, khususnya untuk kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dapat dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial masyarakat yang diharapkan tidak akan dapat terealisasi secara optimal.⁷

Jika dilihat dari sudut pandang *maqashid asy-syariah*, keadilan dan kemaslahatan sosial mutlak dianggap sebagai substansi dari ajaran agama Islam. Syariat Islam dibangun berdasarkan asas hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Ia merupakan keadilan yang bersifat mutlak, kasih sayang, kemaslahatan, dan hikmah oleh karenanya, setiap persoalan yang bertolak belakang dari keadilan menuju kezaliman, kasih sayang menuju kekerasan, maslahat menuju kemudaratkan (keburukan), serta hikmah menuju sesuatu yang bernilai sia-sia, maka itu semua bukanlah bagian dari syariat, sekalipun ditafsirkan sebagai syariat.⁸ Dalam suatu sistem Islam, kebaikan seseorang dipandang sebagai kebaikan masyarakat dan sebaliknya, kalau masyarakat makmur, orangnya berkecukupan, dan kalau orang-orang makmur, masyarakat juga makmur.

Berbicara mengenai maslahat dalam *maqashid asy-sari'ah*, Abdul Wahab Kholaf mendefinisikan maslahat sebagai berikut:

المصلحة التي لم يشرع الشارع حكماً لتحقيقها ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها
أو العائها

“suatu kemaslahatan dimana syari’ tidak mensyari’atkan suatu hukum untuk merealisasi kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalanya.”⁹

Abdul Wahab Khalaf menyebutkan bahwa para ulama telah menetapkan 3 syarat dalam menjadikan *Al Maslahah Al Mursalah* sebagai hujjah: *Pertama*, berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang semu. Artinya, penetapan hukum syara’ itu dalam kenyataannya benar-benar menarik suatu manfaat atau menolak bahaya. Jika hanya didasarkan bahwa penetapan hukum itu mungkin menarik suatu manfaat, tanpa membandingkan dengan yang menarik suatu bahaya, berarti didasarkan atas kemaslahatan yang semu. *Kedua*: berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Artinya, penetapan hukum syara’ itu dalam kenyataannya dapat menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan bagi perorangan atau bagian kecil dari mereka. Hukum tidak ditetapkan demi kemaslahatan khusus pemimpin atau para pembesar saja, dengan tidak melihat mayoritas manusia dan kemaslahatan mereka. Kemaslahatan itu harus untuk mayoritas umat

⁷ Kementerian Agama RI, *pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf*, hlm 76.

⁸ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Ilam al-Muwaqqiin an Rabb al-Alamin* (Kairo: Dar al Hadith, 2006) Juz II, hlm

⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh* (Kairo: Darul ‘ilmi, 1978), hlm. 84.

manusia. *Ketiga*: penetapan hukum untuk kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan nash atau ijma'.¹⁰

Adanya mashlahat sesuai dengan *maqashid asy-syari'ah* (tujuan-tujuan syara'), artinya dengan mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan *maqashid asy-syari'ah*. Sebaliknya, mengenyampingkan maslahat, berarti mengenyampingkan *maqashid asy-syari'ah*. Sedang mengenyampingkan *maqashid asy-syari'ah* adalah batal. Oleh karena itu, adalah wajib menggunakan dalil maslahat atas dasar bahwa ia adalah sumber hukum pokok (*ashl*) yang berdiri sendiri.

Allah berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (QS. Al-Baqarah: 185).

Tapi adakalanya mereka para ahli waris merasa kurang puas dengan pembagian harta warisannya, karena terlalu sedikit, atau rakus, kemudian memperlakukan harta benda yang telah diwakafkan tersebut dan mengambil kembali. Bahkan ada lagi yang dikhawatirkan kemungkinan-kemungkinan terhadap harta benda yang telah diwakafkan itu.¹¹

Seperti pemindahan harta wakaf menjadi milik pribadi atau adanya penyalagunaan tujuan. Hal-hal yang berkaitan dengan perubahan harta wakaf tersebut di atas karena kurangnya pengawasan terhadap masalah harta wakaf, terutama mengenai persyaratan yang harus dipenuhi bagi wakif yang mewakafkan hartanya kurang begitu ditaati. Ini dimungkinkan karena mereka menganggap bahwa akad wakaf hanya dilakukan oleh sepihak (*tabarru*) tanpa ada pihak kedua dan beranggapan tidak akan timbul masalah di kemudian hari, sehingga mereka mengabaikan alat-alat bukti, terutama alat bukti saksi ketika terjadinya ikrar wakaf.¹²

Dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan; “Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi”.¹³

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam bab II mengenai fungsi, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf pasal 218 ayat (1) secara tegas menyatakan: Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.¹⁴

¹⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, hlm. 86.

¹¹ Satria Efendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet Ke-1 (Jakarta: Prenada Media), hlm 410.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, tth., hlm. 522.

¹³ Departemen Agama, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Jakarta: Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, hlm. 11.

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Ed. I., Cet. I, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hlm. 218. dan lihat juga: Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: Arkola, tth., hlm. 255-256.

Permasalahan yang terjadi di masyarakat adalah mayoritas dari tanah yang telah diwakafkan tidak memiliki akta ikrar wakaf, sesuai yang dicantumkan didalam pasal 218 Kompilasi Hukum Islam, karena dalam asas retroaktif atau hukum tidak dapat berlaku surut yakni apabila suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat sebelum adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur namun dikemudian hari muncul suatu peraturan yang mengatur hal tersebut maka perbuatan tersebut tetap sah walaupun bertentangan dengan peraturan sekarang. Masyarakat hanya sekedar mewakafkan tanah mereka tanpa memperdulikan apakah tanah yang mereka wakafkan sudah sesuai dengan prosedur tata cara mewakafkan tanah melalui peraturan pemerintah yang dituangkan didalam undang-undang.

Tetapi didalam ketentuan pasal 218 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat dengan para ulama' fiqih yang tidak pernah mempersyaratkan adanya saksi, ulama' fiqih hanya menetapkan empat rukun wakaf diantaranya, pemberi wakaf (*waqif*), benda yang diwakafkan (*mauquf*), penerima wakaf (*mauquf 'alaih*), dan sighthat ijab dan qabul, mereka tidak menetapkan kesaksian dua orang saksi dan sertifikasi dari petugas pemerintah sebagai rukun dari wakaf.¹⁵ Sebab dalam hukum Islam menganggap harta yang diwakafkan sepenuhnya adalah milik Allah dan memberi wakaf adalah semata-mata demi mengharap ridha Allah SWT. Berbeda halnya dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI. Pasal 218 KHI menyatakan bahwa: "pihak yang mengwakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.¹⁶ Khoirul Abror menyatakan bahwa pendapat para ulama madzhab menjelaskan bahwa pelaksanaan perwakafan tidak terikat dengan birokrasi atau administratif. Sebab harta yang diwakafkan sepenuhnya milik Allah. Jika Nazir telah memenuhi syarat dan demi kebaikan umum, maka pelaksanaannya tidak terikat dengan orang lain, sepenuhnya merupakan ijtihad Nadzir yang sesuai dengan tuntunan Islam.¹⁷

Dapat dikatakan perbuatan wakaf masyarakat sebelum adanya kompilasi hukum Islam secara syari'at agama memang sah dan dapat berlaku dimasyarakat. Dari sini bisa kita ketahui bahwa dalam formulasi ketentuan kompilasi hukum Islam memiliki perbedaan dengan pendapat ulama' madzhab, hal ini bisa menjadi suatu permasalahan ketika dalam masyarakat tertentu masih memegang erat dengan pedoman kitab-kitab klasik karya para ulama' tersebut tanpa memandang dengan aturan hukum positif di Indonesia, namun dikemudian hari menimbulkan sengketa diantara para pihak yang dibawa ke ranah pengadilan yang sudah pasti akan kekurangan alat bukti akibat tidak dimilikinya akta ikrar wakaf.

Jadi, penulis berpendapat bahwa secara yuridis, saksi dalam ikrar wakaf minimal dua orang dihadapan Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir. Hal ini sudah memiliki kepastian hukum, namun sisi yang lain juga perlu

¹⁵ Edi Gunawan, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 12, Nomor 1, Desember 2015, hlm 21.

¹⁶ Khoirul Abror, *Dinamika Perwakafan Dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim*, Al-'Adalah Vol. XII, No. 2 Desember 2014, hlm 8.

¹⁷ Khoirul Abror, *Dinamika Perwakafan Dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim*, hlm 8.

diperhatikan, yaitu apakah semuanya dapat memberikan kemanfaatan untuk masing-masing pihak ataukah kebalikannya. Boleh jadi di dalam praktiknya, seringkali pihak yang menjadi saksi kurang begitu memerhatikan urusan setelah ditunaikan kewajibannya itu. Bagaimanapun juga, aspek kemashlahatan menjadi urusan yang urgen demi mencapai keridhoan Allah SWT.

Sebab wakaf merupakan salah satu ibadah yang berdimensi ganda, yaitu dimensi sosial dan dimensi ritual. Namun, di sisi lain banyak faktor yang mendorong seseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf atau menarik kembali harta yang telah diwakafkan, baik oleh orang yang mewakafkan sendiri, maupun oleh ahli warisnya. Di antaranya, makin langkanya tanah, makin tingginya harga, menipisnya kesadaran beragama dan bisa jadi juga disebabkan orang yang berwakaf telah mewakafkan seluruh atau sebagian besar dari hartanya, sehingga dengan demikian keturunannya merasa kehilangan sumber rezeki dan menjadi terlantar.¹⁸

Praktik wakaf yang tidak memperhitungkan sumber rezeki bagi keturunan yang menjadi tanggung jawabnya, bisa menjadi malapetaka bagi generasi yang ditinggalkan. Oleh sebab itu, tidak mustahil dijumpai ahli waris yang mengingkari adanya ikrar wakaf dari orang tuanya, tidak mau menyerahkan tanah wakaf kepada nadzir yang ditunjuk, atau sama sekali tidak mau memberitahukan kepada petugas adanya ikrar wakaf yang didengarnya dari orang tuanya.¹⁹

Disamping faktor-faktor tersebut di atas, tidak mengakui adanya ikrar wakaf bisa jadi juga disebabkan karena sikap serakah ahli waris, atau karena memang sama sekali tidak mengetahui adanya ikrar wakaf, karena tidak pernah diberi tahu oleh orang tuanya.²⁰

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa saksi wakaf ketika ikrar wakaf memang pada waktu itu tidak begitu penting (tidak diharuskan), karena mereka menganggap wakaf pada waktu perbuatan hukum yang dilakukan oleh sepihak dan pelepasan hak tersebut ditujukan pada Allah dalam rangka mendekatkan diri pada Allah untuk tujuan ibadah dalam mencari keridhoan-Nya. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal di kemudian hari, seperti berpindahnya harta wakaf menjadi milik pribadi atau adanya sengketa dari ahli waris untuk mengambil kembali harta yang telah diwakafkan atau penyalagunaan wakaf yang menyimpang dari tujuan semula, maka wakaf harus mempunyai kedudukan yang jelas di depan hukum.²¹

Penulis juga mengemukakan dengan adanya suatu legalitas hukum, maka akan menjamin atau melindungi harta yang diwakafkan seperti halnya dalam tujuan syari'at (*maqasid asy-syari'ah*) yang salah satu prinsip utamanya adalah *hifdzul mal* (menjaga harta) agar harta yang diberikan untuk wakaf memiliki kemaslahatan bagi umat manusia. Hal ini akan menjadi suatu permasalahan yang berakibat kepada perlindungan harta benda yang dijadikan objek wakaf apabila tidak adanya pemenuhan syarat administratif dan juga bukti hukum telah diadakannya perbuatan hukum berupa sertifikasi atau sertifikasi pemberian wakaf dalam bentuk akta wakaf. Sehingga dengan adanya ketentuan dengan adanya saksi dan juga bukti hukum berupa sertifikasi wakaf menjadi suatu hal yang penting dalam mencapai tujuan syari'at

¹⁸ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Ed. I, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 410.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 411.

²⁰ *Ibid.*, hlm 412.

²¹ *Ibid.*, hlm. 126

(*maqashid asy-syari'ah*) berupa *hifdzul mal* (menjaga harta) demi tercapainya kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Kemudian bagaimana status wakaf yang dilakukan sebelum adanya ketentuan dalam kompilasi Hukum Islam pada pasal 218 ayat (1) yang pada waktu itu dilakukan tanpa adanya syarat seperti dua orang saksi dan juga akta ikrar wakaf, karena hal demikian akan memberikan peluang untuk menciderai tujuan syari'at berupa *hifdzul mal* tersebut.

Mengingat betapa pentingnya alat bukti kaitannya dengan masalah saksi perwakafan dalam upaya memberikan kepastian hukum guna mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan seperti hal tersebut di atas dikarenakan faktor utamanya adalah alat buktinya tidak ada. Maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul “**Ketentuan Sertifikasi dan Saksi Wakaf Dalam Pasal 218 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqashid As-Syariah**”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Apakah urgensi sertifikasi dan saksi ikrar wakaf dalam pasal 218 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana sertifikasi dan saksi ikrar wakaf dalam pasal 218 ayat (1) kompilasi hukum Islam perspektif *maqashid asy-syari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui urgensi sertifikasi dan saksi ikrar wakaf dalam pasal 218 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
2. Mengetahui sertifikasi dan saksi ikrar wakaf dalam pasal 218 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perspektif *maqashid asy-syari'ah*

D. Manfaat Penelitian

1. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman kepada masyarakat dalam proses pengurusan wakaf agar sesuai dengan pasal 218 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga terpenuhi *Maqasid Asy-Syariah*.
2. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi serta referensi dalam menambah khazanah keilmuan dalam perkembangan hukum Islam dan hukum positif.

E. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian yang lebih akurat sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, selain berdasarkan data-data yang diperoleh, maka peneliti juga berpijak pada karya-karya pendukung yang memiliki referensi terhadap tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada, maka di

bawah ini penulis paparkan beberapa kajian pustaka yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian penulis.

Dalam Skripsi yang berjudul “*Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar*”. Oleh Marsudi Sarwo Widodo, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2008. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi tanah wakaf setelah diberlakukannya UU No.41 Tahun 2004 di Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar.

Dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Terhadap Sertifikasi Dalam Sengketa Tanah Wakaf (Study Kasus Mushola Nurun Nafi di Jalan Kintelan Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang)*”. Oleh Hazian Aulia Magnesi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, tahun 2018. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang kedudukan hukum sertifikasi dalam sengketa tanah wakaf Mushola Nurun Nafi di Jalan Kintelan Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang.

Dalam Skripsi yang berjudul “*Status Kekuatan Tanah Wakaf Tanpa Sertifikat di Desa Lumbang Rejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan*”. Oleh Wiwin Ima Shofa, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Malang, tahun 2008. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang status kekuatan Tanah Wakaf tanpa adanya proses Sertifikasi di Desa Lumbang Rejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan yang akan dibahas pada skripsi ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu karena penulis meletakkan posisi fokus objek penelitiannya pada pembahasan tentang Ketentuan Sertifikasi dan Saksi Wakaf dalam Pasal 218 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maqasid Asy-Syariah*, sehingga persoalan tersebut membedakan dengan penelitian-penelitian yang pernah membahas tentang perwakafan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, yaitu jenis penelitian menggunakan sumber data primer undang-undang dan menggunakan sumber data *library research* (penelitian pustaka) untuk dikaji dalam bentuk penelitian doktrinal (*doctrinal research*). Penelitian doktrinal mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²² Sedangkan study kepustakaan yaitu suatu usaha untuk memperoleh data atau informasi yang di perlukan serta menganalisis suatu permasalahan melalui sumber-sumber kepustakaan, penulis menggunakan study kepustakaan atau *library research* ini dimaksudkan untuk memperoleh dan menelaah teori-teori yang berhubungan dengan topik dan sekaligus dijadikan landasan teori.²³

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 14.

²³ Prof.Sutrisno Hadi,MA,*Metodologi research I*,(Yogyakarta : Andi Ofset,1997), cet 25,hlm.82

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Data skunder merupakan data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.²⁴ Data skunder tersebut diperoleh dari sumber hukum primer, sumber hukum skunder, dan sumber hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara yuridis,²⁵ meliputi:
 - a. Sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan sertifikasi dan saksi dalam wakaf, dalam hal ini penulis membatasi pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 218 ayat (1).
- 2) Bahan hukum skunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa: tulisan-tulisan atau pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan sertifikasi dan saksi wakaf dalam perspektif *Maqashid Asy-Syari'ah*, seperti pendapat dari Munawir Syadzali dan Ahmad Rofiq, sumber-sumber hukum yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadits.
- 3) Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder antara lain; Jurnal Hukum serta buku-buku Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, dalam hal ini akan selalu ada hubungan antara teknik pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Pengumpulan data tak lain adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian.

Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumenter, teknik dokumenter merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian,²⁶ yakni penulis mengumpulkan buku-buku yang ada hubungannya dengan pembahasan penulisan skripsi, dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber utama, penelitian kepustakaan dengan menganalisa terhadapnya dan sumber lain yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pembahasan, yaitu ketentuan sertifikasi dan saksi wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 218 ayat 1 (satu) perspektif Maqasid Asy-Syariah.

²⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm 215.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UIN-Press), 2007), hlm. 52.

²⁶ Drs. Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta : 2004 Hal.181

4. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu, suatu usaha untuk mengumpulkan data dan menyusun data kemudian diusahakan adanya analisis dan interpretasi atau penafsiran data tersebut.²⁷

Selanjutnya untuk mengkaji pasal 218 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam tentang ketentuan sertifikasi dan saksi wakaf perspektif maqasid asy-syariah, dilakukan analisis komparasi atau perbandingan yaitu, membandingkan dari beberapa segi, data lain, situasi lain dan konsepsi filosofi lain²⁸. Dalam hal ini yang dimaksud membandingkan dari beberapa segi ialah membandingkan antara pendapat para ulama' fiqh dengan formulasi Kompilasi Hukum Islam yang berlaku secara positif di Indonesia.

G. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.²⁹ Dalam penyajian data ini, penulis akan menyajikan data berbentuk uraian deskripsi dan menjelaskan hubungan antar kategori yang akan penulis teliti. Hal ini dimaksudkan agar data yang sudah diperoleh dapat disajikan secara sistematis dan mudah dibaca serta dipahami.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi initerdiri dari 5 (lima) bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab II : Dalam bab ini berisi tentang pengertian wakaf, sejarah wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, pengertian saksi Wakaf, syarat-syarat saksi Wakaf, pengertian sertifikasi Wakaf, syarat-syarat sertifikasi Wakaf, pengertian Maqasid Asy-Syariah , syarat-syarat Maqasid Asy-Syariah dan pembagian *Maqasid Asy-syariah*.

Bab III : Dalam bab ini penulis ingin menguraikan tentang Kompilasi Hukum Islam, sejarah KHI, pembentukan KHI, pemberlakuan KHI, landasan dan kedudukan KHI, perwakafan menurut KHI, dan tata cara proses sertifikasi wakaf.

Bab IV : Bab ini merupakan pokok pembahasan dari penulisan skripsi ini, yaitu analisis pasal 218 Ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam tentang sertifikasi dan saksi wakaf perspektif *Maqasid Asy-Syariah*.

Bab V : Penutup bab ini merupakan penutup dari rangkaian penulisan skripsi ini, yang memuat kesimpulan, saran-saran, dan juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

²⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik* (Bandung : Transito, 1998), hlm. 139

²⁸ Anton Bekker, Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Kansisus, Yogyakarta, 1990. Hlm. 111

²⁹ Mattew B Miles dan Hubernan A. Michael, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992), hlm 19.

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG WAKAF DAN MAQASID ASY-SYARI'AH

A. Pengertian Wakaf

Perkataan *Waqf*, yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Jika dihubungkan dengan ilmu tajwid adalah tata cara menyebut huruf-hurufnya, dari mana dimulai dan dari mana harus berhenti. Pengertian menahan dihubungkan dengan harta kekayaan. Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.³⁰

Dalam peristilahan syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul asli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud tahbisul asli adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwarisakn, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.

Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:³¹

a. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menarik kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”, karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan atas harta tersebut kepada yang lain. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan

³⁰ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta : UI-Press, 1988), hlm.80

³¹ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm.2

itu berlaku untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh diisyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).³²

c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain., baik dengan tukaran atau tidak.³³ Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkan tersebut kepada mauquf 'alaih sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangan tersebut.

Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan di atas tampak secara jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi, keempat mazhab tersebut berbeda pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali oleh waqif.³⁴

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dirumuskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.³⁵ Undang-undang ini tampaknya mencoba untuk menggabungkan pendapat-pendapat ulama fikih klasik tentang wakaf. Namun pasal ini mempunyai kelemahan. Penggabungan pendapat ulama dalam Pasal 1 dikhawatirkan berakibat pada status wakaf menjadi tidak jelas karena memiliki dua opsi yaitu untuk selamanya atau sementara. Dengan demikian, wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta lebih bermanfaat bagi kepentingan umum sesuai syari'ah. Wakaf juga dapat diartikan sebagai pemberian benda yang tahan lama kepada penerima wakaf untuk kepentingan masyarakat yang hanya dapat diambil manfaatnya.

B. Sejarah Wakaf

Wakaf di Indonesia sebagai lembaga Islam yang erat kaitannya dengan masalah sosial dan adat Indonesia, telah dikenal sejak sebelum kemerdekaan yaitu sejak Islam masuk Indonesia. Adapun sejarah perkembangan perwakafan di Indonesia sebagai berikut :

³² Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm.5

³³ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2008), hlm.3

³⁴ Suhrawardi K. Lubis Dkk, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.6

³⁵ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm.18

1. Wakaf di Zaman Kesultanan

Banyak bukti-bukti ditemukan bahwa pada masa kesultanan telah dilakukan ibadah wakaf, hal ini dapat dilihat pada peninggalan sejarah, baik berupa tanah dan bangunan masjid, bangunan madrasah, komplek makam, tanah lahan baik basah maupun kering yang ditemukan hampir di seluruh Indonesia terutama yang di zaman dulu Kesultanan / Susuhan atau pernah diperintah oleh Bupati yang beragama Islam. Bukti itu antara lain tanah-tanah yang diantaranya berdiri masjid seperti:

- a. Masjid Al Falah di Jambi berasal dari tanah Sultan Thah Saifudin;
- b. Masjid Kauman di Cirebon wakaf dari Sunan Gunung Jati;
- c. Masjid di Demak wakaf dari Raden Patah;
- d. Masjid Menara si Kudus wakaf dari Sunan Muria;
- e. Masjid Jamik Pangkalan wakaf dari Sultan Abdul Qodirun;
- f. Masjid Agung Semarang wakaf dari Pangeran Pandanaran;
- g. Masjid Ampel di Surabaya wakaf dari R. Rochmat Sunan Ampel;
- h. Masjid Agung Kauman di Yogya wakaf dari Sultan Agung;
- i. Masjid Agung Kauman di Solo wakaf dari Susuhunan Paku Buwono X.³⁶
- j. Untuk Masjid Agung Banten dan madrasah-madrasahny mendapat tanah wakaf dari Maulana Hasanudin, Maulana Yusuf, Maulana Pangeran Mas dan Hartawan Muslim yang luasnya ratusan hektar;
- k. Masjid Agung Demak dan pesantrennya dibiayai dari hasil tanah wakaf sawah seluas kurang lebih 350 hektar wakaf dari Raden Patah;
- l. Masjid Agung Semarang dibiayai dengan tanah wakaf Bupati Semarang pertama yakni Pangeran Sember nyawa seluas kurang lebih 19 hektar.

Pengaturan wakaf pada jaman kesultanan terutama di Jawa (khususnya Jawa Tengah) pada saat itu telah diatur pada Staatsblad No. 605, jo. Besluit Governen General Van Ned Indie ddp. 12 Agustus 1896 No. 43, jo ddo. 6 November 1912. No. 22 (Bijblad 7760), menyatakan bahwa masjid-masjid di Semarang, Kendal, Kaliwungu dan Demak memiliki tanah sawah bondo masjid (5% Moskeembsvndem) sebagai food untuk membiayai pemeliharaan dan perbaikan masjid, halaman dan makam keramat dari wali yang ada dilingkungan masjid-masjid tersebut.³⁷ Hal tersebut menunjukkan pada jaman kesultanan telah ada peraturan harta wakaf sekalipun dalam hal yang masih terbatas.

³⁶ HM Munir SA, *Wakaf Tanah menurut Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, (Pekan Baru: UIR Pres Pekan Baru, 1991), hlm. 140-143

³⁷ Agus Fathuddin Yusuf, *Melacak Bondo Masjid yang Hilang*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2001), hlm. 80.

2. Wakaf Pada Zaman Kolonial

Pada zaman pemerintah kolonial telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur tentang persoalan wakaf, antara lain :

- 1) Surat edaran Sekretaris Gubernur pertama tanggal 31 Januari 1905, No. 435, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1905 No. 6196, tentang *Toezicht op den houw van Muhammedaansche bedehuizen*. Surat edaran ini ditujukan kepada para kepala wilayah di Jawa dan Madura kecuali wilayah-wilayah di daerah Swapraja dimana sepanjang belum dilakukan supaya para Bupati membuat daftar rumah-rumah ibadah Islam yang ada di Kabupaten masing-masing. Dalam daftar itu harus di catat asal-usul tiap-tiap rumah ibadat, dipakai untuk salat jum'at atau tidak, ada pekarangan atau tidak, ada wakaf atau tidak. Disamping itu setiap Bupati diwajibkan pula untuk membuat daftar yang membuat keterangan tentang segala benda yang tidak bergerak yang oleh pemiliknya (orang bumi putra) ditarik dari peredaran umum baik dengan nama wakaf atau nama lain.
- 2) Peraturan ini ternyata menimbulkan reaksi dari pergerakan-pergerakan dari umat Islam karena orang yang berwakaf dalam prakteknya harus minta ijin kepada Bupati, walaupun katanya hanya bermaksud untuk mengawasi reaksi tersebut sebenarnya merupakan penentangan terhadap campur tangan Pemerintah Kolonial terhadap urusan-urusan yang berhubungan dengan agama Islam. Oleh karena itu Pemerintah Kolonial mengeluarkan surat edaran lagi pada tahun 1931.
- 3) Surat Edaran Sekretaris Gubernur tanggal 4 Juni 1931 No. 1361/A, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1931 No. 12573, tentang *Toizich Van de Regeering op Mohammedaan schebedehuizen, Vrijdagdienstten en wakaf*.
- 4) Meskipun sudah ada sedikit perubahan dalam surat edaran yang kedua ini, namun masih tetap ada reaksi dari pergerakan-pergerakan dari umat Islam, dengan alasan bahwa menurut Umat Islam perwakafan adalah suatu tindakan hukum privat (*materiil privaatrecht*). Mereka beranggapan bahwa perwakafan adalah pemisahan harta benda dari pemiliknya dan ditarik dari peredaran, dan ini termasuk dalam hukum privat. Oleh karena itu untuk sahnya tidak perlu izin dari pemerintah, bahkan pemerintah tidak perlu campur tangan.³⁸

Kemudian Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan surat edaran lagi, yakni Edaran Gubernur tanggal 24 Desember 1934 No. 3088/A sebagaimana Bijblad tahun 1934 No. 13390 tentang *Toezicht Van de Regeering op Mohammedaansche bedehuizen, Verijdogdiesten en wakaf*. Surat edaran ini sifatnya hanya mempertegas apa yang disebutkan dalam surat edaran sebelumnya dimana Bupati boleh memimpin usaha untuk

³⁸ HM Munir SA, *Wakaf Tanah menurut Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, (Pekan Baru: UIR Pres Pekan Baru, 1991), hlm.143

mencari penyelesaian seandainya persengketaan dalam masyarakat dalam hal pelaksanaan shalat jum'at, asalkan pihak-pihak yang bersangkutan memintanya. Oleh karena itu Bupati haru mengamankan keputusan itu, jika salah satu pihak tidak mematuhi.

Ketiga surat edaran itu kemudian disusul dengan surat edaran Sekretaris Gubernur tanggal 27 Mei 1935 No.1273/A, sebagaimana yang termuat dalam Bijblad 1935 No.13480 tentang *Teozijh Vande Regeering Muhammedaansche bedehuizen en Wakaf*. Dalam surat edaran ini diberikan beberapa penegasan tentang prosedur perwakafan di samping itu dalam surat edaran ini juga disebutkan bahwa setiap perwakafan harus diberitahukan kepada Bupati dengan maksud supaya Bupati dapat mempertimbangkan atau meneliti peraturan umum atau peraturan tempat yang dilanggar agar Bupati dapat mendaftarkan wakaf itu di dalam daftar yang disediakan untuk itu. Peraturan-peraturan tersebut pada jaman kemerdekaan masih tetap berlaku terus karena belum diadakan peraturan perwakafan yang baru.

Pemerintah Republik Indonesia juga tetap mengakui hukum agama mengenai soal wakaf, namun campur tangan terhadap wakaf itu hanya bersifat menyelidiki, menentukan, mendaftarkan, dan mengawasi pemeliharaan benda-benda wakaf agar sesuai dengan tujuan dan maksud wakaf. Pemerintah sama sekali tidak bermaksud mencampuri, menguasai atau menjadikan barang wakaf menjadi tanah milik Negara. Dasar hukum, kompetensi dan tugas mengurus soal-soal wakaf oleh Kementerian Agama adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1949 Jo. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1980 serta berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 9 dan No. 10 tahun 1952. Peraturan Menteri Agama No 9 dan No. 10 tahun 1952, menyatakan bahwa Jawatan Urusan Agama dengan kantorkantor saluran vertikal di daerah-daerah KUA Pusat, KUA Kabupaten dan KUA Kecamatan mempunyai salah satu kewajiban menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi atau menyelenggarakan pemilihan wakaf.

Menurut peraturan tersebut perwakafan tanah menjadi wewenang Menteri Agama yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten. Sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Bersama antar Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria tertanggal 5 maret 1956 No. Pem.19/22/23/7.SK/62/Ka/59, maka pengesahan perwakafan tanah milik yang semula menjadi wewenang Bupati dialihkan kepada Kepala Pengawas Agraria. Pelaksanaan selanjutnya diatur dengan Surat Pusat Jawatan Agraria Kepala Pusat Jawatan Agraria tanggal 13 februari 1960 No. 2351/34/11.

Dari peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, tampak adanya usaha-usaha untuk menjaga dan melestarikan tanah wakaf yang ada di Indonesia, bahkan usaha penertiban juga diperlihatkan oleh pemerintah RI. Disamping beberapa peraturan yang telah dikemukakan, Departemen Agama pada tanggal 22 Desember 1953 juga mengeluarkan petunjuk-petunjuk mengenai wakaf.

Tugas bagian D (ibadah sosial) jawatan urusan agama surat edaran jawatan urusan agama tanggal 8 Oktober 1956, No. 3/D/1956 tentang wakaf yang bukan milik kemasjitan. Meskipun demikian peraturan-peraturan yang ada tersebut kurang memadai. Oleh karena itu dalam rangka pembaharuan Hukum Agraria di Negara Indonesia, Persoalan tentang perwakafan tanah diberi perhatian khusus sebagaimana terlihat dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yakni UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Bab II, Bagian XI, pasal 49.

Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang berkembang di Indonesia yang pada umumnya berupa tanah milik, erat sekali hubungannya dengan pembangunan. Semakin meningkatnya pembangunan di Indonesia, kebutuhan tanah baik untuk memenuhi kebutuhan perumahan perorangan maupun untuk pembangunan-pembangunan prasarana umum seperti jalan, pasar, sekolahan, fasilitas olah raga, dan industri meningkat pula. Kondisi yang demikian menyebabkan pemerintah mulai memikirkan usaha-usaha untuk memanfaatkan tanah yang ada secara efisien dan mencegah adanya pemborosan dalam memanfaatkan tanah. Dari data-data tanah menunjukkan bahwa masih ada daerah terdapat peta-peta dengan gambaran tanah rusak terutama di daerah-daerah yang penduduknya padat dan status tanahnya bukan tanah-tanah orang-orang yang menggarapnya.

Disamping hal di atas ada keluhan masyarakat dan instansi yang mengelola tanah wakaf bahwa sebelum dikeluarkan PP. No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah Milik, Pengurusan dan pengelolaan tanah-tanah wakaf kurang teratur dan kurang terkendali, sehingga sering terjadi penyalahgunaan wakaf.³⁹ Kondisi demikianlah yang mendorong pemerintah untuk mengatasi masalah yang muncul dari praktek perwakafan di Indonesia. Hal ini tergambar dari latar belakang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977. Di Indonesia, campur tangan pemerintah dalam hal perwakafan mempunyai dasar hukum yang kuat. dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (1) di bawah bab Agama, dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Hazairin, norma dasar yang tersebut dalam Pasal 29 ayat (1) itu tafsirannya antara lain bermakna bahwa “Negara Republik Indonesia” wajib menjalankan syari’at Islam bagi orang Islam, syari’at Nasrani bagi orang Nasrani, syariat Hindu bagi orang Bali sekedar menjalankan syari’at (norma hukum agama) itu memerlukan perantaraan Kekuasaan Negara.⁴⁰

Kekuasaan Negara yang wajib menjalankan syari’at masing-masing agama yang diatur dalam Negara Republik Indonesia ini adalah kekuasaan Negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Hal ini disebabkan oleh syari’at yang berasal dari agama yang dianut warga Negara Republik Indonesia itu adalah kebutuhan hidup para pemeluknya. Disamping itu pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

³⁹ Suharmadi dan Muhda Hadisaputra dan Amidhan, *Pedoman Praktis Perwakafan*, (Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid, 1990), hlm. 129.

⁴⁰ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hlm. 34

dengan jelas juga menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dilihat dari ayat (1) dan ayat (2) pasal 29 UUD 1945 tersebut jelas bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah yang termasuk ibadah alamiah yaitu ibadah berupa penyerahan harta (mal) yang dimiliki seseorang menurut cara-cara yang ditentukan.⁴¹ Wakaf adalah ibadah yang menyangkut hak dan kepentingan orang lain, tertib administrasi dan aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat agar hak dan kewajiban serta kepentingan masyarakat itu dapat berjalan dengan baik, sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk mengatur masalah wakaf dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan itu ketertiban dalam praktek perwakafan ini dapat terwujud hingga manfaatnya pun dapat dirasakan oleh masyarakat.

3. Wakaf di Zaman Kemerdekaan

Perwakafan umum di Indonesia belum diatur dalam bentuk perundang-undangan, karena perwakafan masuk cakupan hukum Islam, maka pelaksanaan hukum itu berlaku berdasarkan hukum Islam, dalam hal ini fiqih Islam. Di Indonesia sampai sekarang terdapat berbagai perangkat peraturan yang berlaku yang mengatur masalah perwakafan tanah milik, seperti dimuat dalam buku *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah* yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI, maka dalam uraian ini dapat dikemukakan aturan-aturan itu sebagai berikut:

- 1) UU No 15 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pasal 49 ayat (1) memberi isarat bahwa “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah karena peraturan ini berlaku umum, maka terdapat juga didalamnya mengenai pendaftaran tanah wakaf.
- 3) Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 tentang permintaan dan pemberian izin pemindahan Hak Atas Tanah. Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 23 September 1961
- 4) Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Dikeluarkannya PP No. 38 tahun 1963 ini adalah sebagai satu realisasi dari apa yang dimaksud oleh pasal 21 ayat (2) UUPA yang berbunyi Pasal 1 PP No. 38 tahun 1963 selain menyebutkan bankbank negara, (huruf a) dan perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian, (huruf b) sebagai badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, selanjutnya disebutkan pula (huruf c) badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanahan setelah mendengar Menteri Kesejahteraan sosial.

⁴¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: Penerbit UI Press, Jakarta 1998), hlm. 98-99

- 5) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, seperti dinyatakan dalam konsiderennya pada bagian menimbang huruf c, maka peraturan pemerintah ini dikeluarkan untuk memenuhi yang telah ditentukan oleh pasal 14 ayat (1) huruf b dan pasal 49 ayat (3) UU No. 5/ 1960.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
- 7) Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 tahun 1977 Perwakafan Tanah Milik.
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 1978 tentang Penambahan ketentuan mengenai biaya pendaftaran tanah untuk Badan-badan hukum tertentu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1978 pasal 4a ayat (2).
- 9) Permendagri No. 12 Tahun 1978 ini menentukan “Untuk Badanbadan hukum sosial dan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri yang bersangkutan, berlaku ketentuan biaya pendaftaran hak dan pembuatan sertifikat sebagai yang ditetapkan, sepanjang tanah yang bersangkutan dipergunakan untuk keperluan sosial atau keagamaan”. Yang dimaksud tanah untuk keperluan kegiatan sosial dan keagamaan tersebut diatas, tentu termasuk tanah wakaf. Dan seperti ditegaskan oleh ayat (1) pasal 4a ini, maka biaya pendaftaran hak dan pembuatan sertifikat sebesar 10 kali tarif yang ditetapkan dalam Bab II.
- 10) Instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1978 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Instruksi ini ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama seluruh Indonesia.
- 11) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 348 Tahun 1982 tentang penyertifikatan tanah bagi Badan Hukum Keagamaan, Badan Hukum sosial dan lembaga pendidikan yang menjadi objek proyek operasi nasional Agraria. Dalam keputusan Menteri dalam Negeri ini dengan jelas disebutkan bahwa dalam penyertifikatan tanah secara masal, maka tanah-tanah yang dikuasai atau dipunyai oleh Badan Hukum Keagamaan, Badan Hukum Sosial, dan lembaga Pendidikan yang dipergunakan secara langsung untuk kepentingan di bidang keagamaan, sosial dan pendidikan dapat dijadikan objek proyek nasional agraria.
- 12) Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. Kep/D/75/78 tanggal 18 April 1978 tentang formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik.
- 13) Keputusan Menteri Agama No.73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ setingkat diseluruh Indonesia untuk mengangkat atau memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf (PPAIW).
- 14) Instruksi Menteri Agama No. 3 Tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1978.

- 15) Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. DII/5Ed/14/1980 tanggal 25 Juni 1980 tentang pemakaian bea materai dengan lampiran Surat Dirjen Pajak No. S-629/Pj.33/1980 tanggal 29 Mei 1980 yang menentukan jenis formulir mana yang dikenakan bea materai, dan berapa besar materainya.
- 16) Surat Dirjen Bimas Islam dan urusan Haji No. DII/5Ed/14/1981 tanggal 17 Februari 1981 kepada Gubernur Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia, tentang Pendaftaran Perwakafan tanah milik dan permohonan keringanan atau pembebasan biaya.
- 17) Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.DII/5ED/14/1981 tentang Petunjuk Pemberian Nomor pada formulir Perwakafan Tanah Milik. Selain sebagai peraturan instruksi dan edaran seperti disebutkan terdahulu, secara khusus masih ada instruksi dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mengenai pendaftaran tanah wakaf di daerah masing-masing.
- 18) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mengenai pendaftaran Tanah Wakaf di daerah masing-masing.

Disamping itu peraturan-peraturan yang langsung berkenaan dengan masalah perwakafan, sebagaimana telah disebutkan ada juga beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak langsung yakni peraturan perundang-undangan yang menyebut tentang perwakafan tanah milik. Peraturan per Undang-Undangan itu antara lain sebagai berikut :

- 1) UU No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tanggal 24 September Tahun 1960. Pasal 49 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960 memberi isyarat bahwa “Perwakafan Tanah Milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
- 2) PP No. 10 Tahun 1961 tanggal 23 Maret Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Peraturan ini berlaku umum, artinya semua tanah. Oleh karena itu peraturan ini juga berlaku untuk tanah wakaf.
- 3) Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 tentang Permintaan dan Pemberian ijin Pemindahan Hak Atas Tanah. Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 23 September Tahun 1961.
- 4) PP No. 38 Tahun 1963 tentang penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1978 tentang Biaya Pendaftaran Tanah.
- 6) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 348 Tahun 1982 tentang Penyertifikatan Tanah Bagi Badan Hukum Keagamaan, Badan Hukum Sosial dan Lembaga Pendidikan yang menjadi objek Proyek Operasi Nasional Agraria.

- 7) Surat Menteri Dalam Negeri No. SK.178/DJA/1982 tentang penunjukan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pusat sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik.⁴²

Di Indonesia, pada awalnya bentuk wakaf yang dikenal masyarakat secara luas hanya dalam wakaf tanah, namun kini setelah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf tunai, masyarakat telah mengenal bahwa wakaf tidak hanya tanah, tetapi wakaf dapat berbentuk uang. Perbincangan tentang wakaf sejak awal memang selalu diarahkan pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya. Sedangkan untuk wakaf benda tidak bergerak baru mengemuka belakangan ini. Di antara wakaf benda bergerak yang sedang banyak dibicarakan adalah bentuk wakaf yang dengan sebutan *Cash Waqf*, yang diterjemahkan dengan wakaf uang. Namun jika melihat objek wakafnya yang berupa uang, maka wakaf ini lebih tepat kalau diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Sesuai dengan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal 26 April 2002 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf uang (*cash wakaf/ waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Dalam pengertian tersebut, yang dimaksud dengan uang adalah surat-surat berharga.²³ Wakaf tunai ini termasuk salah satu wakaf produktif. Seorang ahli zakat K.H. Didin Hafiduddin menjelaskan bahwa wakaf produktif merupakan pemberian dalam bentuk sesuatu yang bisa diupayakan untuk digulirkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Mengenai bentuknya bisa berupa uang maupun surat-surat berharga.

Di Indonesia sendiri, wakaf uang memang tergolong masih baru. Salah satu contoh wakaf uang di Indonesia adalah Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhu'afa Republika. Lembaga otonom Dompot Dhu'afa Republika ini memberikan fasilitas permanen untuk kaum dhu'afa. Dengan adanya layanan kesehatan ini, golongan masyarakat miskin bisa memperoleh haknya tanpa perlu dibebankan oleh biaya-biaya seperti halnya rumah sakit konvensional.

⁴² Nurul Huda dan Muhamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 324-325.

C. Dasar Hukum Wakaf

Berikut ini ada beberapa dasar hukum tentang wakaf yaitu:

1. Al-Qur'an

Para ulama menjadikan dalil atau dasar hukum wakaf dalam alquran dengan memperhatikan maksud umum dari wakaf kemudian mencocokkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang ternyata ayat tersebut jugamerupakan dasar hukum islam yang lima yang berarti harus ditunaikan (wajib hukumnya) sesuai hal dengan yang berkaitan dengannya, sementara wakaf bukan salah satu rukun islam yang harus di penuhi melainkan suatu kebajikan yang sangat perlu untuk di perhatikan untuk terbantunya para fakir miskin dan kepentingan lainnya. Oleh karena itu, ayat al-qur'an tentang wakaf telah dirumuskan oleh para ulama sebagai berikut

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahnnya daripadanya, bpadahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah, bahwa allah maha kaya lagi maha terpuji." (Al Baqarah ayat 267)

Kata-kata *tunfiq* pada ayat di atas mengandung makna umum, yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan, sedangkan wakaf adalah menafkahkan harta pada jalan kebaikan sehingga ayat ini dijadikan sebagai dalil wakaf.

2. Hadits

عن ابن عمر رضى الله عنهما ان عمر بن الخطاب اصاب ارضا بخيبر فتأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال : يا رسول الله انى اصببت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط انفس عندى منه فما تتأمرنى به قال : ان شئت حبست اصلها فتصدقت بها عمر انه لا يباع ولا يوهب ولا يرث وتصدق بها فى الفقراء وفى القربى وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول (رواه مسلم)

Artinya : dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar Ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk Umar berkata : Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan kepadaku ? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta (HR. Muslim)⁴³

Umar menyedekahkannya dan berwasiat bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dan harta wakaf tersebut bermanfaat dan membantu umat Islam yang membutuhkan dan dapat meringankan beban. Di dalam kitab hadis (shahih) Bukhari, soal wakaf dimasukkan ke dalam bab wasiat. Penempatan wakaf di dalam bab wasiat tidaklah tepat, karena antara keduanya terdapat perbedaan. Perbedaan itu nyata dalam hal-hal berikut: dalam wasiat hak atas benda yang diwasiatkan baru akan berpindah setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Dalam wakaf pemindahan hak itu terjadi seketika setelah orang berikrar atau menyatakan kehendaknya untuk mewakafkan hartanya. Berbeda dengan wasiat, dalam wakaf barang yang diwasiatkan tidak boleh lagi di ganggu gugat lagi oleh orang yang mewakafkannya, karena menurut pendapat yang umum, pemilikannya telah dikembalikan kepada Allah. Yang tinggal hanyalah pemanfaatan hasilnya untuk kepentingan umum.⁴⁴

D. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan sesuatu hal. Tanpa adanya rukun-rukun yang telah ditetapkan, wakaf tidak dapat berdiri.⁴⁵ Adapun rukun pembentukan wakaf yang dimaksudkan adalah:

- a. Orang yang berwakaf (yang mewakafkan hartanya) atau yang disebut wakif
- b. Harta yang diwakafkan atau mauquf bih
- c. Tujuan wakaf atau yang berhak menerima hasil wakaf disebut mauquf ‘alaih
- d. Pernyataan wakaf dari wakif yang disebut sighat.

Di samping memenuhi rukun, masing-masing haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Adapun syaratnya yaitu:

⁴³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta, 2003), hlm. 28

⁴⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), hlm. 82

⁴⁵ Dr. Mukhtar Lutfi, *Evaluasi Sistem Pengelolaan Wakaf di Kota Makassar*, (Makassar : alauddin university press, 2014), hlm. 49

- a. Syarat sebagai wakif sebagaimana menurut jumhur ulama bahwa wakif harus orang cakap bertindak, dapat pula dikontekskan bahwa wakif haruslah orang yg tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Dalam hal wakif perseorangan, dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan yaitu: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. Dalam hal wakif organisasi, dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Dan wakif badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.⁴⁶ Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam syarat-syarat sebagai wakif diatur dalam ketentuan pasal 217 ayat 1 dan ayat 2.
- b. Syarat mauquf bih yaitu pertama, barangnya dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam dalam keadaan apapun. Kedua, jelas wujud dan batas-batasnya. Ketiga, milik wakif secara sah. Keempat, zatnya harus kekal.
- c. Syarat mauquf alaih yaitu objek atau tujuan wakaf harus objek kebajikan dan harus jelas.
- d. Syarat sighat wakaf ialah bahwa wakaf disighatkan baik dengan lisan, tulisan, maupun dengan isyarat. Untuk ikrar wakaf dinyatakan untuk selama-lamanya, jelas kepada siapa diwakafkan, dan harus disaksikan dan dinyatakan dengan tegas.
- e. Nazhir atau orang yang diberi amanah untuk mengelolah wakaf. Nazir harus cakap dan amanah.

E. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dibagi menjadi dua (2) macam:⁴⁷

1. Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf Dzurri. Pada perkembangan selanjutnya wakaf dzurri ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf itu oleh keluarga yang disertai harta wakaf ini. Lebih-lebih kalau keturunan keluarga tersebut berlangsung kepada anak cucunya.⁴⁸

2. Wakaf Khairi

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemaslahatan umum. Wakaf ini ditujukan kepada umum, dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid,

⁴⁶ Departemen agama. Peraturan Perundangan Perwakafan tahun 2006

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008), hlm.14

⁴⁸ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), hlm.35

sekolah, jembatan, rumah sakit, dll Wakaf khairi atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran islam dan yang dianjurkan pada orang yang mempunyai harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih bisa diambil manfaatnya.⁴⁹

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf dibagi menjadi dua macam :⁵⁰

a. Wakaf Langsung

Yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat sholat, sekolah, rumah sakit, dll. Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi. Wakaf seperti ini merupakan aset produktif yang sangat bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Wakaf seperti ini bertujuan memberi manfaat langsung kepada semua orang yang berhak atas wakaf tersebut.

b. Wakaf Produktif

Yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif diolah untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf.

F. Saksi Wakaf

Saksi atau kesaksian berfungsi untuk mengungkapkan dan menjelaskan tentang suatu perkara yang disengketakan. Saksi dalam bahasa Arab disebut al-syahādah, masdar dari syahada yaitu *al-syuhūd* yang berarti *al-hudūr* (hadir). Secara bahasa berarti berita pemutus, secara istilah artinya pemberitahuan orang yang jujur untuk menetapkan kebenaran dengan lafal “kesaksian” di dalam majelis peradilan. Atau pemberitaan seseorang dengan sebenarnya atas selain dirinya dengan lafal atau ucapan yang khusus.⁵¹

Dalam konteks persaksian secara umum, menjadi sangat urgen dalam setiap melakukan perbuatan hukum apa saja, apalagi peristiwa hukum selalu diikuti dengan perkembangan zaman yang selalu bergerak dinamis, tentunya persoalan saksi menjadi begitu penting. Peristiwa hukum dimaksud apakah itu perkawinan, perwakafan, atau masalah masalah yang berhubungan dengan perbuatan jarimah, seperti hudud. Melihat

⁴⁹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta : UI-Press, 1988), hlm. 90

⁵⁰ Suhairi , *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm.13

⁵¹ Sayid Abu Bakr al-Dimyati, *I'ānatu al-Talibin*, j-3, cet-4, Beirut-Libanon: Ihyā' alTurāṣal-Araby, tt, hlm

peranan saksi yang begitu penting, maka dalam urusan perwakafan menurut UU No 41 Tahun 2004, terutama pasal 17 ayat (1) menjadi syarat yang harus dipenuhi dari pihak yang mewakafkan dengan mengikrarkan secara jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan petugas Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Saksi tersebut dihadiri minimal 2 (dua) orang.

Kedudukan saksi yang dihadiri minimal 2 (dua) orang sebagai bentuk dari persaksian atau yang menyaksikan memberi tahu apa yang ia saksikan dan lihat dalam mengikrarkan harta atau benda wakaf kepada pihak nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Perbuatan hukum tersebut mempunyai akibat hukum bagi pengelola wakaf (nadzir) dan saksi khususnya. Terutama saksi, yang dapat juga disebut pihak ketiga (orang lain) dapat mengerti dan tahu bahwa harta atau benda tersebut sudah menjadi benda atau harta wakaf dan menyosialisasikan kepada orang lain yang tidak tahu. Selain itu saksi juga memiliki fungsi untuk dimintai persaksiannya ketika di kemudian hari terjadi sengketa terkait dengan harta atau benda wakaf, baik sebagai saksi di pengadilan ataupun diluar pengadilan.⁵²

Adapun syarat menjadi saksi dalam ikrar wakif adalah

1. Dewasa
2. Beragama Islam
3. Berakal Sehat, dan
4. Tidak berhalangan melakukan perbuatan hukum

Perbuatan hukum berpindahnya hak seseorang atas benda baik yang bergerak ataupun tidak bergerak kepada orang yang diserahkan untuk mengelola benda atau harta wakaf, urusan wakaf dalam prakteknya dapat memberikan kemaslahatan atau kemanfaatan bagi kebanyakan orang yang menjadi sarana atau prasarana umum, apakah itu gedung-gedung, rumah, masjid, mushola, kuburan, madrasah, pesantren atau harta lainnya yang memiliki fungsi sosial. Adanya masalah sesuai dengan *maqashid asy-syari'ah* atau tujuan-tujuan syari'i dalam artian dengan mengambil masalah berarti sama dengan merealisasikan *maqashid asy-syari'ah*.⁵³

G. Sertifikasi Wakaf

1. Pengertian Sertifikasi

Secara bahasa, kata sertifikasi berasal dari kata sertifikat. Kata sertifikat berbentuk kata benda yang memiliki arti tanda surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atas suatu kejadian.⁵⁴ Sementara kata sertifikasi merupakan kata kerja yang berarti penyertifikatan atau proses pemberian sertifikat dari orang yang berwenang kepada yang berhak menerima sertifikat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai

⁵² Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif, terj. oleh Muhyiddin Mas Rida, Cet I*, (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm 171

⁵³ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia; Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi dan Yurisprudensi, Ed. I, Cet. 2*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 105-111.

⁵⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa Edisi ke Empat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1290

data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Untuk mendapatkan sertifikat tanah, maka seseorang perlu terlebih dahulu untuk mendaftarkan tanahnya ke instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional. Pendaftaran tanah menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.⁵⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi tanah adalah pendaftaran tanah hak milik untuk ditindaklanjuti dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

2. Dasar Hukum Sertifikasi Akta Ikrar Wakaf

Adapun dalam Islam, dasar hukum sertifikasi diatur dalam firman Allah surat Al Baqarah ayat 282 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلَأْ وَلْيُهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْنَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا

⁵⁵ Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2015), hlm. 148

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ بِالْ كُلِّ شَيْءٍ عَالِمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhan-nya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 282)

Sedangkan dalam hukum positif, dasar hukum sertifikasi atau pendaftaran tanah wakaf di Indonesia diatur dalam;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), yaitu terdapat dalam Pasal 19, 23, 32, dan 38;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; dan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
8. Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
9. Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 Tahun 2004 dan Nomor 3/SKB/BPN/2004 tentang Sertifikat Tanah Wakaf

3. Mekanisme Sertifikasi Wakaf

Seperti diketahui bahwa hukum Islam menganjurkan setiap muslim yang memiliki harta kekayaan supaya tidak hanya menggunakan hartanya untuk kepentingan sendiri saja, akan tetapi harus diperuntukkan bagi kepentingan umum, dengan ancaman bahwa orang-orang yang tidak membelanjakan hartanya akan ditimpa bencana seolah-olah seluruh tubuhnya dibakar dengan api, dan mereka akan digantikan oleh orang-orang yang bersedia mempergunakan hartanya untuk kepentingan umum.⁵⁶

Salah satu hal yang selama ini belum pernah diatur dan dilaksanakan secara seksama adalah pensertifikasian atau pendaftaran tanah-tanah yang diwakafkan menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria. Pendaftaran tanah wakaf ini sangat penting artinya, baik ditinjau dari segi tertib hukum maupun dari segi administrasi penguasaan dan penggunaan tanah wakaf sesuai dengan peraturan perundang-undangan agraria.⁵⁷

Dalam kitab fiqh diterangkan bahwa wakaf telah berlaku dengan sebuah lafazh, walaupun tidak diumumkan oleh hakim dan hilang miliknya wakif darinya walaupun barang tersebut masih ada di tangannya. Demikian pendapat Imam Malik yang diikuti oleh Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Akan tetapi, Abu Hanifah berpendapat, bahwa tidak berlaku wakaf itu apabila tidak terlepas dari milik wakif, apabila hakim memberikan putusan dengan mengumumkan wakaf tersebut.⁵ Ini berarti menurut Abu Hanifah, bahwa wakaf akan berlaku apabila telah diumumkan oleh hakim atau pengadilan.

Pada masa Rasulullah tidak dijelaskan tata cara pendaftaran tanah wakaf secara rinci, karena ketika itu perwakafan secara administratif belum dikenal, namun kita dapat mempelajarinya dari praktek-praktek yang dilakukan oleh Rasulullah ataupun para sahabat. Dalam masalah muamalah, ada tuntunan Al Quran yang menganjurkan untuk menuliskan dan disaksikan dua orang saksi laki-laki, seperti yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282. Surat al-Baqarah ayat 282 itu memang bukan di khususkan terhadap sertifikasi tanah wakaf, namun dalam ayat tersebut tersirat bahwa Islam juga menghendaki masalah wakaf dengan tertulis atau memakai administrasi serta saksi karena masalah wakaf juga termasuk muamalah yang sudah diatur Allah swt. Jadi lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ini dapat dikatakan sebagai implementasi terhadap ayat-ayat Tuhan.⁵⁸

Sertifikasi tanah wakaf merupakan serangkaian proses pendaftaran tanah wakaf untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap tanah wakaf tersebut. Adapun tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf tersebut termuat dalam BAB IV Bagian Kesatu Paragraf 1, yaitu Pasal 38 dan Pasal 39, yakni sebagai berikut;

⁵⁶ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hlm. 104

⁵⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 90

⁵⁸ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hlm. 104

1. Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW;
2. Selain persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilampirkan persyaratan sebagai berikut;
 - a. Sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau bukti pemilikan tanah lainnya;
 - b. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;
 - c. Izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;
 - d. Izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dari sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan;
 - e. Izin dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik dalam hal hak guna bangunan atau hak pakai diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.
3. Pendaftaran sertifikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau APAIW dengan tata cara sebagai berikut;
 - a. Terhadap tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - b. Terhadap tanah milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - c. Terhadap hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan di daftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - d. Terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir;
 - e. Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.

Dengan telah didaftarkannya dan dicatatnya wakaf tersebut pada Kantor Badan Pertanahan Nasional dalam sertifikat tanah hak milik yang diwakafkan, maka tanah wakaf itu telah mempunyai alat pembuktian yang kuat, berupa “sertifikat tanah wakaf”.

Sertifikat tanah wakaf merupakan program nasional sebagai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengetahui secara pasti jumlah tanah wakaf di Indonesia, khususnya di Aceh harus dilakukan pendataan secara pasti

karena masih banyak masyarakat yang melakukan wakaf tanah tanpa ikrar wakaf dan tidak didaftarkan.

H. Pengertian *Maqasid Asy-Syariah*

Secara etimologi *maqashid asy-syariah* merupakan istilah gabungan dari dua kata *maqashid* dan *al syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *maqsud*, *qasd*, *maqsid* atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada yaqsudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan. *Syari'ah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. *Syari'ah* secara terminologi adalah *al nusush al muqaddasah* (teks-teks suci) dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang muttawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Secara terminologi, *maqasid al syariah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syari'ah.⁵⁹

Membicarakan tentang *maqashid asy-syari'ah* atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian Ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian Ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh dan Ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah SWT dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi Muhammad SAW dalam Sunnah yang terumuskan dalam fiqh akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.⁶⁰ Bahwasannya banyak ulama yang mendefinisikan tentang *maqashid asy-syariah*, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut pernyataan al-Syatibi dapat dikatakan bahwasannya, kandungan *maqasid asy-Syariah* atau tujuan hukum ialah kemaslahatan umat manusia. Penekanan *maqasid asy-Syariah* yang dilakukan al-Syatibi secara umum betitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.⁶¹
- b. Menurut al-Gazali dapat dikatakan bahwa *maqasid asy-Syariah* merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum islam melalui pendekatan *maqasid asy-Syariah* dapat membuat hukum islam lebih flexibel.⁶²

⁵⁹ Moh. Toruquddin, *Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur* (Jurnal), hlm. 2

⁶⁰ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al'Syariah dalam Hukum Islam* (Jurnal : Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009), hlm. 117

⁶¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 64-66

⁶² Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012), hlm. 3

- c. Menurut Ibnu Ashur bahwa *maqasid asy-Syariah* adalah tujuan-tujuan aKHIr yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. *Maqasid asy-Syariah* bisa berupa *maqasid asy-Syariah al'ammah* yang meliputi keseluruhan aspek syariat. Dan *maqasid asy-Syariah* khusus yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti *maqasid al syariah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain lain, atau *maqasid asy-Syariah al juz' iyyah* yang meliputi setiap hukum syara' seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya.⁶³

I. Tujuan *Maqasid Asy-Syariah*

Para ulama salaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki alasan (*illah*) dan juga tujuan (*maqashid*), pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya ialah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam Jasser Audah menyebutkan, syariah ialah suatu kebijakan kehidupan dunia dan akhirat. Syari'ah merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan dan kebaikan. Bahwasannya, dari apa yang secara singkat kita paparkan di atas sudah jelas bahwa, ide sentral dan sekaligus tujuan aKHIr dari *maqasid asy-Syariah* ialah masalah. Dengan demikian tidak ada salahnya jika dalam pembahasan ini di ketengahkan pengertian masalah agar pemahaman tentang *maqasid asy-Syariah* menjadi semakin utuh dan sempurna. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu melainkan juga semua manusia secara keseluruhan.

J. Tingkatan *Maqasid Asy-Syariah*

1. Kemaslahatan *Dharuriyah* (Primer)

Konsep *dharuriyah* sepadan dengan konsep primer dalam tingkatan kebutuhan manusia. Islam sangat memperhatikan kebutuhan *dharuriyah* untuk mewujudkan dan juga memeliharanya. Adapun *dharuriyah* artinya sesuatu yang semestinya harus ada untuk menegakkan kemaslahatan, baik agama dan dunia. Dari sudut pandang *dharuriyah* dalam hal muamalah adalah memelihara keturunan dan harta, termasuk juga memelihara jiwa dan akal.⁶⁴ Kemaslahatan ini adalah kepentingan yang harus ada untuk terwujudnya kemaslahatan dunia akhirat. Apabila kepentingan tersebut tidak ada maka kelangsungan hidup di dunia tidak dapat dipertahankan dan akhirat akan mengalami kerugian eskatologis. Kepentingan ini disebut juga dengan kepentingan primer. Menurut al-Syathibi, perlindungan terhadap lima kemaslahatan, penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta digolongkan ke dalam kategori kemaslahatan ini.⁶⁵

2. Kemaslahatan *Hajiyah* (Sekunder)

⁶³ Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012), hlm. 3

⁶⁴ Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), h. 128-129

⁶⁵ Rusydi, M., Mughits, Abdul (Eds). (2008). *Filsafat Ekonomi Islam*. Cet. Ke-satu. Yogyakarta: Forum Studi Ekonomi Islam, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, hlm. 215

Secara bahasa diartikan sebagai kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum *rukhsah* (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.⁶⁶

Hajiyah disepadankan dengan kebutuhan sekunder dalam tingkatan kebutuhan. Kebutuhan *hajiyah* tidak seesensial *dharuriyah* melainkan hanya menghindarkan manusia dari kesulitan dalam kehidupannya. Adapun *hajiyah* artinya sesuatu yang sangat diperlukan untuk menghilangkan kesulitan yang dapat membawa kepada hilangnya sesuatu yang dibutuhkan, tetapi tidak sampai merusak kemaslahatan umum. *Hajiyah* ini berlaku baik, pada berbagai macam ibadah, adat kebiasaan, mu'amalah dan jinayah.⁶⁷

Pada ibadah misal, seperti rukhsah yang diberikan kepada orang yang sakit dan dalam perjalanan dalam melaksanakan sholat atau bermusafir. Dalam bidang adat misal, seperti kebolehan berburu, dan memakan makanan halal dan lainnya. Dalam bidang mu'amalah ialah seperti melaksanakan transaksi jual beli dan lainnya. Pada bidang jinayah (pidana) misal, seperti hukum sumpah atas pembunuhan dan kewajiban membayar denda kepada keluarga pembunuh atau kebolehan karena bukti lemah dan tidak cukup dalam merusak kepentingan umum.⁶⁸

3. Kemaslahatan *Tahsiniyah* (Tersier)

Kemaslahatan *Tahsiniyah* merupakan perwujudan kepentingan yang tidak bersifat dharuri dan tidak bersifat haji. Dengan kata lain, jika kepentingan ini tidak terwujud, maka tidak menyebabkan kesulitan apalagi mengancam kelangsungan hidup. Sifatnya hanyalah komplementer yang bertujuan untuk mewujudkan praktik ibadah dan muamalat yang lebih baik serta mendorong akhlak dan kebiasaan terpuji.⁶⁹

Dalam arti lain apa yang terhimpun dalam batasan akhlak yang mulia, baik dalam masalah ibadah, seperti menghilangkan najis, melakukan berbagai macam cara dalam bersuci maupun dalam adat kebiasaan seperti adab makan dan minum. Begitu juga dalam hal mu'amalah seperti dilarangnya jual beli najis dan dicegah membunuh orang merdeka dengan sebab dia membunuh budak pada masalah jinayah.⁷⁰

⁶⁶ Muzlifah, Eva. (2013). *Maqashid Syari'ah Sebagai Paradigma Ekonomi Islam*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, ISSN: 2088-6365 Vol. 3, No. 2, hlm. 59

⁶⁷ Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 130

⁶⁸ Moh. Mukri, *Paradigma Masalah dalam Pemikiran Al-Ghazali*, (Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press, 2011), hlm. 117

⁶⁹ Rusydi, M., Mughits, Abdul (Eds). (2008). *Filsafat Ekonomi Islam*. Cet. Ke-satu. Yogyakarta: Forum Studi Ekonomi Islam, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, hlm. 216

⁷⁰ Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), hlm.130

BAB III

KETENTUAN WAKAF DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Kompilasi Hukum Islam

1. Latar Belakang Penyusunan KHI

Ungkapan bahwa UUD 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis, di samping berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis yang dijumpai dalam penjelasan umumnya menjadi dasar konstitusional dan sinyal organik keberadaan hukum tidak tertulis dalam tata hukum nasional. Norma dasar dalam pasal II aturan Peralihan UUD 1945 menunjukkan hukum yang menjadi isi awal tata hukum nasional dengan menyatakan segala peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD⁷¹.

KHI disusun atas prakarsa penguasa Negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Secara resmi Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil konsensus (ijma') ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional, yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara⁷².

Penyusunan KHI dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dalam bentuk tidak tertulis ke dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunannya dapat dirinci pada dua tahapan. *Pertama*, tahapan pengumpulan bahan baku, yang digali dari berbagai sumber baik tertulis maupun tidak tertulis. *Kedua*, tahapan perumusan yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum Islam (Al-quran dan Sunnah), khususnya ayat yang teksnya berhubungan dengan substansi KHI. Dalam penyusunan KHI, secara substansial dilakukan dengan mengacu kepada sumber hukum Islam yakni Alquran dan Sunnah, dan secara hirarkial mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku⁷³.

Dari sudut lingkup *the ideal law*, kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia, terutama tentang: (1) adanya norma hukum yang hidup dan ikut serta bahkan mengatur interaksi sosial, (2) aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum, (3) responsi struktural yang dini melahirkan rangsangan KHI, dan (4) alim ulama Indonesia mengantisipasi ketiga hal di atas dengan kesepakatan bahwa KHI

⁷¹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 58.

⁷² Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. I (Jakarta: PT. LogosWacana Ilmu, 1999), hlm. 8.

⁷³ Edi Gunawan, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, jurnal IAIN Manado, hlm 4.

adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.⁷⁴

Berkenaan dengan kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional, diukur oleh unsur-unsur sistem hukum nasional sebagaimana telah dikemukakan. *Pertama*, landasan ideal dan konstitusional KHI adalah Pancasila dan UUD 1945. hal itu dimuat dalam konsiderans Instruksi Presiden dan dalam penjelasan umum KHI. Ia disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia. *Kedua*, ia dilegalisasi oleh instrument hukum dalam bentuk Instruksi Presiden yang dilaksanakan oleh Keputusan Menteri Agama, yang merupakan bagian dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ketiga*, ia dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan Sunnah Rasul. Hal itu yang menjadi inti hukum Islam yang mencakup berbagai dimensi: syariah, fiqh, fatwa, qanun, idarah, qadha, dan adat. Ia merupakan perwujudan hukum Islam yang bercorak keindonesiaan. *Keempat*, saluran dalam aktualisasi KHI antara lain pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana dapat ditafsirkan secara teleologis dari penjelasan umum KHI⁷⁵. Sumber, legalitas, dan adaptasi dalam pengumpulan bahan dan Perumusan KHI.

Kelayakan KHI untuk dijadikan pedoman dalam penyelesaian masalah dalam masyarakat, khususnya dikalangan umat Islam berhubungan timbal balik dengan unsur lainnya. *Pertama*, unsur KHI sendiri sebagai bagian dari perangkat hukum yang unifikatif. *Kedua*, unsur aparatur pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang menjadi tokoh rujukan. *Ketiga*, unsur kesadaran hukum masyarakat terutama KHI. *Keempat*, unsur kemudahan yang dapat diperoleh oleh masyarakat dalam melaksanakan KHI.⁷⁶

Proses penyusunan KHI dilakukan secara partisipatif. Ia disusun dengan melibatkan pejabat pemerintahan, hakim, dan para pemimpin masyarakat (ulama, zu'ama, dan cendekiawan) yang representatif. Mereka adalah kelompok pertama yang memiliki tanggung jawab moral untuk mensosialisasikan KHI kepada masyarakat, terutama dikalangan para pengikut mereka. Sosialisasi ini dapat dilakukan dalam bentuk peyampaian informasi dan aksi kemasyarakatan melalui berbagai media yang dapat digunakan. Dengan demikian KHI layak untuk dijadikan rujukan dalam penyelesaian masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang diteladani oleh elite masyarakat itu.

Keberadaan KHI dalam sistem hukum nasional relatif berumur muda. Ia akan dihadapkan kepada berbagai masalah (disamping masalah harapan-harapan), baik dikalangan pemimpin masyarakat maupun dikalangan para pengikut mereka. Masalah

⁷⁴ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, hlm 63.

⁷⁵ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III (Jakarta: CV.Akademika Pressindo, 2001), hlm.

⁷⁶ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm 15.

pertama adalah sosialisasi KHI kepada warga masyarakat, khususnya dikalangan umat Islam secara umum. Masalah kedua, adalah persepsi dikalangan pemimpin masyarakat terhadap KHI, terutama dikalangan mereka yang tidak terlibat dalam proses penyusunannya, sementara mereka memiliki keterikatan yang ketat terhadap ajaran fuqaha dan memiliki pengaruh yang kuat dikalangan para pengikut mereka. Masalah ketiga adalah kemungkinan terjadi perbenturan antara KHI dengan struktur dan pola budaya masyarakat, khususnya di bidang kewarisan. KHI disusun dan diputuskan oleh elite masyarakat dipusat pemerintahan dan pendidikan, sementara sebagian besar masyarakat bermukim di pedesaan yang terikat dengan tradisi lokal. Masih besar kemungkinan, masyarakat menerima hukum kewarisan Islam secara simbolik, sedangkan substansinya mengacu kepada kaidah lokal yang berlaku secara turun temurun. Pengkajian tentang hal ini sangat tepat untuk dilakukan secara cermat dan interdisipliner⁷⁷. Dengan cara demikian, dapat dilakukan pelukis jelasan hukum kewarisan itu secara deskriptif. Bertitik tolak dari hasil pengkajian itu, kemudian dapat dilakukan sosialisasi yang tepat pula.

Hukum Islam di Indonesia masa kini adalah merupakan sebuah label yang diberikan pada ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia dan sekaligus menampilkan corak khas ke-Indonesiaannya. Sistem dan budaya Indonesia akan lebih terefleksi di dalamnya sehingga hukum Islam dimaksud untuk beberapa bagian tertentu baik yang menyangkut kaidah hukumnya maupun pola pemikiran yang mendasarinya akan menunjukkan beberapa perbedaan dengan Hukum Islam yang berlaku dilain tempat seperti Saudi Arabia, Mesir, Iran, Pakistan dan lain-lain sekalipun sifat dasar yang sama karena bersumberkan pada sumber yang sama yaitu Alquran dan Sunnah. Mungkin apa yang kita sebut dengan Hukum Islam Indonesia masa kini masih belum terwujud sebagaimana yang kita harapkan bersama atau mungkin juga belum terpolakan dengan jelas, apa yang sekarang kita hadapi dengan diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam adalah bagian dari apa yang kita perbincangkan mengenai keberlakuan Hukum Islam di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai satu di antara sekian banyak karya⁷⁸ umat Islam Indonesia dalam rangka memberi arti yang lebih positif bagi kehidupan beragamanya dalam rangka kebangkitan umat Islam di Indonesia. Secara tidak langsung ia juga merefleksi tingkat keberhasilan tersebut. Sehingga dengan membaca karya tersebut orang akan dapat memberikan penilaian tingkat kemampuan umat Islam dalam proses pembentukan hukum. Akan tetapi, karena Kompilasi Hukum Islam harus dilihat bukan sebagai sebuah final, maka kita juga dapat melihatnya sebagai salah satu jenjang dalam

⁷⁷ Dalam penelitian Cik Hasan Bisri dkk (1997) disebuah desa di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, menunjukkan terjadi pergulatan antara hukum kewarisan Islam dipahami dengan pemikiran yang sederhana dan dalam konteks kebudayaan lokal, sehingga mengalami bias dan reduksi pemahaman. Hukum kewarisan itu diterimasimbolik, sedangkan substansinya berakar pada sutruktur dan pola budaya masyarakat lokal. Dalam Edi Gunawan, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hlm 5.

⁷⁸ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm 6.

usaha tersebut dan sekaligus juga menjadi batu loncatan untuk meraih keberhasilan yang lebih baik di masa mendatang.

1) Tujuan Kompilasi.

a. Melengkapi pilar Peradilan Agama⁷⁹.

Adapun pilar-pilar yang dimaksud adalah:

- a) Adanya badan peradilan yang terorganisir berdasarkan kekuatan Undang-undang.
- b) Adanya organ atau pejabat pelaksana yang berfungsi melaksanakan jalannya peradilan.
- c) Adanya sarana hukum positif yang pasti dan berlaku secara unifikasi.

b. Menyamakan persepsi penerapan hukum⁸⁰.

Dengan adanya KHI sebagai kitab hukum, para hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berdisparitas. Dengan berpedoman kepada KHI para hakim diharapkan dapat menegakkan hukum dan kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi kemungkinan terjadinya putusan-putusan yang bercorak variable. Asal tetap proporsional secara kasuistik.

c. Mempercepat proses *Taqribi Bainal Ummah*⁸¹.

Dengan adanya KHI dapat diharapkan sebagai penyeberangan kearah memperkecil pertentangan dan perbantahan KHI lafiah.

d. Menyingkirkan paham *Private Affairs*⁸².

Maksudnya menghilangkan pikiran bahwa persoalan tersebut adalah persoalan hukum dan tidak harus diselesaikan secara pribadi karena itu adalah persoalan Negara yang merupakan tanggung jawab aparaturnya.

Sebagai perangkat hukum, KHI telah menampung bagian dari kebutuhan masyarakat di bidang hukum yang digali dari (sumber) nilai-nilai hukum yang diyakini kebenarannya. KHI dapat memberikan perlindungan hukum dan ketentraman batin bagi masyarakat, karena ia menawarkan simbol-simbol keagamaan yang dipandang oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sakral. Ia juga mengakomodasi berbagai pandangan dan aliran pemikiran di bidang fiqh yang secara sosiologis memiliki daya pesan dan daya layak untuk dilaksanakan oleh warga masyarakat yang memerlukannya.⁸³

Mengenai fungsi KHI, secara singkat KH. Hasan Basry menyebutnya sebagai kompilasi untuk menuju kodifikasi. Dikatakannya pula bahwa Kompilasi Hukum Islam yang kini tengah dicanangkan kalau nanti berhasil dikodifikasikan dan dijadikan Undang-

⁷⁹ M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi hukum Islam*, Cet. I (Jakarta: CV. Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.28-29.

⁸⁰ M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, Hlm 32.

⁸¹ M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, Hlm 32.

⁸² Edi Gunawan, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, jurnal IAIN Manado, hlm 7.

⁸³ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, hlm 15.

undang/peraturan oleh pemerintah kita jelas merupakan sumbangan umat Islam yang sangat bagus bagi pembangunan hukum nasional yang selama ini kita dambakan⁸⁴. Berbeda dengan pendapat tersebut Bustanul Arifin mengatakan bahwa kita lakukan adalah kompilasi yaitu mengumpulkan pendapat-pendapat dalam masalah fiqih yang selama ini dianut oleh umat Islam Indonesia. Jadi bukan kodifikasi, sebab istilah ini mengandung arti menciptakan hukum baru atau mengubah yang telah ada⁸⁵.

Dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam pertimbangan-pertimbangan mengenai kemaslahatan amat diperhatikan oleh panitia pembentukan Kompilasi Hukum Islam, terutama mengenai hal-hal berkaitan dalam kategori ijtihad. Dengan begitu diharapkan, selain akan memelihara dan menampung aspirasi hukum serta keadilan masyarakat, kompilasi itu juga akan mampu berperan sebagai perekayasa (*social engineering*) masyarakat muslim Indonesia. Hal itu disebabkan karena masyarakat Indonesia mayoritas menganut agama Islam.

2. Landasan dan Kedudukan KHI

Sebagaimana kita ketahui, selain kesadaran hukum masyarakat dan penegak hukum yang baik dan benar dalam menjalankan tugasnya, penyelenggaraan hukum di dalam suatu masyarakat dan Negara ditentukan pula oleh kejelasan peraturan hukumnya. Peraturan yang jelas ini selain berguna untuk kepastian hukum, sangat diperlukan dalam penegakan keadilan hukum. Di lingkungan Peradilan Agama di tanah air kita di masa yang lampau, hukum yang diterapkan dalam menyelesaikan suatu perkara tidaklah begitu jelas⁸⁶.

Pada dasarnya, secara substantif, berbagai upaya penghimpunan fikih ke dalam bahasa perundang-undangan telah lama dirintis oleh para ahli hukum dan ulama Indonesia. Kehadiran Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebenarnya dapat dilihat sebagai upaya kompilasi, meskipun namanya undang-undang. Undang-undang sendiri memiliki daya ikat dan daya paksa pada subyek dan obyek hukumnya, sementara kompilasi sesuai dengan karakternya, hanyalah menjadi pedoman saja, relatif tidak mengikat. Karena secara yuridis, apabila dilihat dari tertib perundang-undangan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 istilah kompilasi memang tidak termasuk di dalamnya.⁸⁷

Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Menurut Ismail Suny, oleh karena sudah jelas bahwa dalam bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan bagi pemeluk-pemeluk Islam telah ditetapkan oleh Undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam, maka hukum Islam itu yang memuat hukum materilnya dapat ditetapkan oleh Keputusan Presiden/Instruksi Presiden. Pendapat tersebut antara lain didasarkannya pada disertasi dari A.Hamid S. Attamimi. Dan selanjutnya ia

⁸⁴ Hasan Basry, *Perlunya Kompilasi Hukum Islam*, (Mimbar Ulama No. 104 th. X April 1986), hlm. 61.

⁸⁵ Bustanul Arifin, *Kompilasi : Fiqih dalam Bahasa Undang-undang*, (Pesantren, No. 2 Vol. II, 1985), hlm 28.

⁸⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 11 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 295.

⁸⁷ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Cet. I (Yogyakarta: Gema Media, 2001), hlm. 76-77.

mengatakan bahwa Instruksi Presiden tersebut dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat 1 Undang-undang dasar 1945, yaitu kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan Negara. Apakah dinamakan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden, kedudukan hukumnya adalah sama. Oleh karena itu, pembicaraan mengenai kedudukan Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dilepaskan dari Instruksi Presiden yang dimaksud⁸⁸.

Instruksi Presiden ini ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang sudah disepakati tersebut. Kemudian lebih lanjut yang menjadi dasar dan landasan dari Kompilasi ini adalah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksana Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991. konsideran keputusan ini menyebutkan:

- 1) Bahwa Instruksi Presiden Indonesia No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 memerintahkan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya;
- 2) Bahwa penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam tersebut perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab;
- 3) Bahwa oleh karena itu, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991⁸⁹.

Pengaturan lebih lanjut adalah termuat dalam Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Islam atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No. 3694/EV/ HK. 003/ AZ/91 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentang penyebarluasan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Namun sayangnya di sini juga tidak disebutkan/dilampirkan teks resmi dari kompilasi yang merupakan satu kesatuan dari Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang dimaksud.

Semenjak lahirnya Peradilan Agama, para hakim tidak memiliki buku standar yang dapat dijadikan rujukan yang sama. Maka secara praktis, kasus yang sama dapat lahir dari putusan yang berbeda jika ditangani oleh hakim yang berbeda sehingga tidak ada kepastian hukum. Itulah sebabnya pada tahun 1985 pemerintah memprakarsai proyeksi KHI. Proyek ini diwujudkan dalam bentuk SKB antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama di Yogyakarta. Sasaran proyek KHI ini adalah mempersiapkan rancangan buku hukum dalam bidang perkawinan, pembagian warisan, pengelolaan wakaf, sedekah dan infak.⁹⁰

⁸⁸ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm 53.

⁸⁹ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm 55-56.

⁹⁰ Munawir Sadzali, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, dalam Mufti AM, Pembaharuan Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Manado: Jurnal al-Syir'ah), hlm. 73.

Dilihat dari tata hukum nasional, KHI dihadapkan pada dua pandangan; *pertama*, sebagai hukum tidak tertulis seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan instrumen hukum berupa Inpres yang tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan peraturan perundangan yang menjadi sumber hukum tertulis. *Kedua*, KHI dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis yang menunjukkan bahwa KHI berisi *law* dan *rule* yang pada gilirannya terangkat menjadi law. Inpres No. 1 Tahun 1991 dipandang sebagai salah satu produk *political power* yang mengalirkan KHI dalam jajaran law. Pada aKHIrnya masyarakat pemakai KHI yang menguji keberanian pandangan ini sehingga menjadikannya sebagai hukum tertulis.⁹¹

Menurut Masrani Basran, politik hukum nasional sebagaimana ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah kodifikasi hukum, dan di mana mungkin unifikasi hukum. Oleh karena kebutuhan yang amat mendesak, maka Mahkamah Agung berpendapat perlunya ditetapkan sasaran yaitu Kompilasi Hukum Islam. Dikatakannya juga bahwa dengan adanya kompilasi hukum tersebut para Hakim Agama akan mempunyai pegangan tentang hukum yang harus diterapkan dan masyarakat akan lebih mantap dalam pengetahuannya tentang hak dan kewajiban menurut hukum-hukum Islam. Selain itu dikemukakannya pula tujuan lain dari Kompilasi Hukum Islam adalah agar masyarakat Islam yang awam dalam hukum dan berbahasa Arab (bahasa-bahasa kitab kuning) dapat pula mengetahui hak dan kewajiban menurut hukum Islam. Terutama hukum-hukum Islam yang dalam Negara kita telah merupakan hukum positif, yaitu hukum-hukum Islam yang telah menjadi kewenangan Peradilan Agama⁹².

Kehadiran KHI cenderung menjadi alternatif terhadap konstataasi yang berpengaruh kuat pada seleksi pengambilan sumber normatif. Lima sumber utama yang dipilih untuk penyusunan KHI yakni: (1) hukum produk legislatif nasional yang telah tertuang dalam undang-undang dan peraturan lainnya yang relevan, seperti UU No.22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954, UUNo. 1 Tahun 1974, UU No. 7 Tahun 1989, PP No.9 Tahun 1975, PP No.28 Tahun 1977; (2) produk yudisial pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, terutama sepanjang yang mengenai masalah waris dengan dukungan pengalaman tafsir hukum mengantisipasi tuntutan ditengah hubungan konflik hukum Islam dengan hukum adat; (3) produk ekspansi fungsionalisasi ajaran Islam melalui kajian hukum yang dilakukan IAIN dengan pokok bahasan sesuai dengan distribusinya; (4) rekaman pendapat hukum; (5) hasil studi perbandingan di Maroko, Turki, dan Mesir.⁹³

Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat menyatukan wawasan hakim Peradilan Agama Indonesia dalam memecahkan berbagai masalah yang diajukan kepada mereka. Selain itu, seperti yang dikemukakan oleh almarhum Wasit Aulawi, Kompilasi Hukum Islam ini, mudah mudahan dapat (1) memenuhi asas manfaat dan keadilan

⁹¹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, hlm 64.

⁹² Masrani Basran, *Kompilasi Hukum Islam*, Mimbar Ulama No. 105 (t. Cet; t.p: t.th, 1986), h. 10

⁹³ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, hlm 66.

berimbang yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, (2) mengatasi berbagai masalah KHIafiyah (perbedaan pendapat) untuk menjamin kepastian hukum, dan (3) mampu menjamin bahan baku dan berperan aktif dalam pembinaan hukum nasional⁹⁴.

3. Isi Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam terdiri atas tiga buku, masing-masing buku I tentang Perkawinan, buku II tentang Kewarisan dan buku III tentang Perwakafan. Pembagian dalam tiga buku ini hanya sekedar pengelompokan bidang hukum yang dibahas yaitu bidang hukum Perkawinan (munakahat), bidang hukum Kewarisan (faraidh) dan bidang hukum perwakafan. Dalam kerangka sistematikanya masing-masing buku terbagi dalam beberapa bab-bab tertentu dan terbagi pula atas beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam pasal-pasal.

Secara keseluruhan Kompilasi Hukum Islam terdiri atas 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Porsi yang terbesar adalah pada buku Hukum perkawinan, yakni mulai pasal 1 sampai pasal 170. Kemudian Hukum Kewarisan yang dimulai dari pasal 171 sampai dengan pasal 193, Wasiat dimulai dari pasal 194 sampai pasal 209 dan Hibah dari pasal 210 sampai pasal 214. kemudian yang paling sedikit Hukum Perwakafan yang dimulai dari pasal 215 sampai dengan pasal 227. ditambah pasal ketentuan peralihan dan ketentuan penutup yang masing-masing satu pasal. Perbedaan ini timbul bukan karena ruang lingkup materi yang berbeda, akan tetapi hanya karena intensif dan terurai atau tidaknya pengaturannya masing-masing yang tergantung pada tingkat penggarapannya. Hukum perkawinan karena sudah digarap sampai pada hal-hal yang detail dan hal yang sedemikian dapat dilakukan mencontoh pada pengaturan yang ada dalam perundang-undangan tentang perkawinan. Sebaliknya karena hukum kewarisan tidak pernah digarap demikian, maka ia hanya muncul secara garis besarnya dan dalam jumlah yang cukup terbatas⁹⁵.

Selain itu pengaturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam ini khususnya untuk bidang perkawinan tidak lagi hanya terbatas pada hukum substantive saja yang memang seharusnya menjadi porsi dari Kompilasi akan tetapi sudah cukup banyak memberikan pengaturan tentang masalah prosedural atau yang berkenaan dengan cara tatacara pelaksanaan yang seharusnya termasuk dalam porsi perundang-undangan perkawinan. Sebagiannya telah termuat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana kemudian dilengkapi dengan berbagai Undang-undang seperti Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang juga memuat beberapa pasal yang berkenaan dengan hukum acara mengenai perceraian. Akibat dimasukkannya semua aspek hukum tersebut maka terjadi pembengkakan dalam bidang hukum perkawinan sedang dalam hukum lainnya terasa sangat sedikit.

⁹⁴ HA Wasit Aulawi, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Pidato Pengukuhan Guru Besar (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1989), hlm. 12.

⁹⁵ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm 63.

Ditinjau dari materi dan muatan Kompilasi Hukum Islam ini, khususnya mengenai hukum perkawinan dapat dilihat dari banyaknya terjadi duplikasi dengan apa yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan/atau Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 mengingat Kompilasi Hukum Islam ini juga mengatur ketentuan-ketentuan yang bersifat procedural. Namun, kita juga tidak menutup mata banyak hal-hal baru yang kita temukan dalam kompilasi ini. Istilah perkawinan sebagai istilah Indonesia untuk pernikahan melalui Kompilasi ini sudah dibakukan dalam hukum Indonesia. Mengenai pengertian perkawinan yang dalam hal ini digunakan dalam konteks dasar-dasar perkawinan dirumuskan sedikit berbeda dengan apa yang disepakati dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dalam pasal 2 Kompilasi disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian pasal 3 menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁹⁶.

Dalam pasal 5 disebutkan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam “harus” dicatat. Sertifikasi dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954. pasal 6 ayat 1 mengulangi pengertian sertifikasi dimaksud dalam artian setiap perkawinan “harus” dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Bilamana kita membaca lebih lanjut isi Kompilasi kata “harus” di sini adalah maknanya “wajib” menurut pengertian hukum Islam. Oleh karena perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah “tidak mempunyai kekuatan hukum”.⁹⁷

Sebagaimana yang telah diatur mengenai hukum perkawinan dalam buku 1 mengenai ketentuan umum, maka pada buku hukum kewarisan juga diuraikan mengenai pengertian pengertian umum. Seperti apa itu hukum kewarisan, siapa yang dimaksud dengan ahli waris, pewaris, harta warisan, harta peninggalan, wasiat, hibah dan lain-lain. Persoalan agama menjadi sangat esensial sehingga harus ada penegasan bahwa perbedaan agama akan menghilangkan hak waris, namun hal ini tidak kita temukan dalam Kompilasi ini. Sebagaimana halnya pewaris adalah beragama Islam maka ahli waris pun harus beragama Islam juga. Untuk itu pasal 172 menegaskan tentang indikator untuk menyatakan bahwa seorang itu adalah beragama Islam. Mengenai siapa yang ahli waris pasal 174 menyebutkannya secara singkat yaitu ahli waris karena hubungan darah dan ahli waris karena hubungan perkawinan. Kemudian disebutkan keutamaan dari masing-masing ahli waris bilamana semua ahli waris ada. Sayangnya di sini tidak

⁹⁶ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm 66.

⁹⁷ Edi Gunawan, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam*, hlm 13.

disebutkan bagaimana pewarisan dari seorang pewaris yang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris sama sekali. Hal ini, memang ada diatur dalam pasal 191 tetapi mengenai pembagian warisannya. Begitu juga mengenai keutamaan yang sifatnya lebih kasuistik di mana satu ahli waris dapat mendinding (hijab) ahli waris lainnya seharusnya juga dimuat secara lebih rinci disini⁹⁸.

Mengenai buku hukum tentang perwakafan, dalam bab ini isinya jauh lebih sedikit bilamana dibandingkan dengan dua bab sebelumnya, sehingga tidak banyak hal yang perlu dikomentari dalam bagian ini. Selain itu materi hukum yang termuat dalam bagian ini juga sedikit berbeda dengan materi hukum yang diatur dalam dua buku terdahulu yang disebut sebagai materi hukum yang bersifat peka, maka persoalan mengenai perwakafan adalah termasuk dalam lapangan hukum yang bersifat sedikit agak netral.⁹⁹

⁹⁸ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm 79.

⁹⁹ Edi Gunawan, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam*, hlm 14.

B. Wakaf Perspektif Kompilasi Hukum Islam

1. Ketentuan Wakaf Dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam KHI jo. Pasal 1 (1) PP.No.28/1977 wakaf didefinisikan sebagai berikut:

“Perbuatan hukum seorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebahagian dari benda miliknya dan melambangkannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.¹⁰⁰

Dengan demikian, wakaf meliputi pokok-pokok masalah berikut :

- 1) Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang
- 2) Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai
- 3) Harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemilik.
- 4) Harta yang dilepas kepemilikannya itu tidak dapat dihibahkan, diwariskan, atau diperjual belikan
- 5) Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran islam.

Perlu diingat bahwa wakaf itu menurut jenisnya ada dua macam, yaitu : pertama, wakaf ahli atau wakaf keluarga, yaitu wakaf yang di peruntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga maupun tidak. Fazlur rahman menjelaskan bahwa pada masa awal islam muncul praktek sejenis wakaf yang dikenal dengan wakaf keluarga (*wakaf 'ala 'al-aulad*), yang mencegah tanah garapan diserahkan dan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya; harta itu dibiarkan utuh dan pendapatan yang diperoleh dari harta itu dibagi bagikan kepada ahli warisnya. Kebanyakan negara muslim, harta semacam ini ditetapkan masa berlakunya hingga tiga puluh tahun; setelah itu dibagi-bagikan kepada ahli warisnya.¹⁰¹ Ahli waris berhak menerimanya setelah wakil meninggal; wakaf keluarga dijadikan alat untuk mengelak tuntutan kreditor atas utang-utangnya yang dibuat si wakaf sebelum mewakafkan tanah kekayaanya. Oleh karena itu, dibeberapa negara seperti Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair¹⁰². Wakaf keluarga dihapuskan kerana dianggap tidak sejalan dengan maksud syariat Islam.

Kedua, wakaf khairi atau wakaf umum, artinya wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum, seperti mesjid, mushalla, madrasah, pondok pesantren, perguruan tinggi agama dan lain-lain sebagainya. Ini sejalan dengan perintah agama yang secara tegas menganjurkan menafkahkan sebagian kekayaan umat Islam untuk kepentingan umum yang lebih besar dan memiliki pahala jariah yang bersifat kekal.¹⁰³

2. Penerapan Hukum Perwakafan dalam Kompilasi Hukum Islam

Berikut ini kita akan mencoba melihat bagaimana penerapan hukum perwakafkan dalam Komplikasi Hukum Islam di Indonesia.

¹⁰⁰ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di indonesia*, 1998/1999, hlm.99

¹⁰¹ Fazlur Rahman, *Health and Medicine in the Islamic Tradition: Change and Identity*, di terjemahkan oleh Jaziar Radianti dengan judul Etika Pengobatan Islam, Cet 1 (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), hlm. 91

¹⁰² Suparman Usma, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet. I; (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994), hlm. 35

¹⁰³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1977), hlm 491-492.

1) Fungsi, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf.

a. Fungsi Wakaf

Komplikasi Hukum Islam 216 dan PP.No.28/1977 pasal 2 dijelaskan bahwa fungsi wakaf dan mengenalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan dengan ajaran Islam.¹⁰⁴

b. Unsur- unsur dan Syarat-Syarat Wakaf.

Pasal 215 KHI dan pasal 1 (2) PP No.28/1977 menyebutkan bahwa wakaf adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.¹⁰⁵ Unsur-unsur dan Syarat-syarat wakaf:

1) Sebagaimana dijelaskan pada pasal 217 KHI, bahwa badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum (ps. 3 PP No. 28/1977).¹⁰⁶ Ada dua hal yang kita pahami dari syarat ini: yaitu, seorang wakaf tidak seorang muslim. Seorang non muslim pun dapat berwakaf sepanjang dia melakukannya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam dan perundang-undangan yang berlaku, karena wakaf bersifat tabarru, maka dalam pelaksanaannya tidak diperlukan Kabul dari pihak yang menerima.¹⁰⁷

3) *Maukuf/Benda Wakaf.*

Pada KHI pasal 215 (4) dinyatakan bahwa benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.¹⁰⁸ Dan benda ini, sebagaimana termuat dalam Pasal 217 (3), disyaratkan merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.¹⁰⁹

4) *Maukuf ilaih/tujuan wakaf*

Ini adalah pernyataan kehendak dari wakaf untuk mewakafkan benda miliknya, Dalam pasal 5 PP No. 28.1977 jo. Pasal 218 KHI dinyatakan: (1) pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf

¹⁰⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di indonesia*, Cet. II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1977), hlm 492.

¹⁰⁵ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. III (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993), hlm. 175.

¹⁰⁶ Kompilasi Hukum Islam, hlm 99.

¹⁰⁷ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, hlm.494.

¹⁰⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm 494.

¹⁰⁹ Kompilasi Hukum Islam, hlm 99.

sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 2 yang kemudian menuangkannya dalam bentuk akta ikrar wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. (2) dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.¹¹⁰

5) Nadzir

Menurut pasal 219 KHI adalah nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat berikut: warga negara Indonesia, beragama Islam, sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak berada di bawah pengampunan dan bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan; dan jika berbentuk badan hukum, maka nadzir harus memenuhi persyaratan berikut: badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.¹¹¹

2) Kewajiban dan Hak Nadzir.

Kewajiban dan hak-hak nadzir diatur pasal 220 KHI dan pasal 7 PP.No.28/1977 sebagai berikut:

- a) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh menteri Agama.
- b) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggungjawab sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.¹¹²
- c) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.¹¹³ Lalu pada pasal 222 KHI dan pasal 8 PP No. 28/1977 dijelaskan bahwa nadzir berhak mendapat penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.¹¹⁴ Mengingat nadzir baik perorangan maupun badan hukum dibatasi masa tugasnya baik karena halangan samawi maupun kasbi, maka diaperlu diatur. Sebab itu pasal 221 menegaskan:
 - a. Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan agama kecamatan karena meninggal dunia, atas permohonan sendiri, tidak dapat melakukan

¹¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, hlm 101.

¹¹¹ Kompilasi Hukum Islam, hlm 101.

¹¹² Kompilasi Hukum Islam, hlm 101-102

¹¹³ Kompilasi Hukum Islam, hlm 102.

¹¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, hlm 103.

kewajibannya lagi sebagai nadzir dan karena melakukan sesuatu kejahatan sehingga dipidana.

- b. Bila mana terdapat lowongan jabatan nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- c. Seorang nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.¹¹⁵

3. Tata Cara Perwakafan dan Pendaftaran Benda Wakaf

1) Tata cara perwakafan

Dalam KHI pasal 223 dinyatakan bahwa:

- a. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melakukan Ikrar Wakaf.
- b. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- c. Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- d. Dalam melaksanakan ikrar seperti yang dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejabat tersebut dalam pasal 215 ayat (6) surat-surat sebagai berikut:
 - a) Tanda bukti pemilikan harta benda;
 - b) Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
 - c) Dan surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.¹¹⁶ Aturan ini tidak jauh berbeda dengan apa yang ada dalam Pasal 9 PP. No. 28/1977.

2) Pendaftaran benda Wakaf.

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan untuk mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.¹¹⁷

4. Perubahan penyelesaian dan pengawasan benda wakaf

1) Perubahan benda wakaf

Pada dasarnya benda yang telah diwakafkan tidak dapat di ubah lagi kecuali timbul faktor yang mengharuskan perubahan itu. Ini telah di atur dalam pasal 11 PP, No.28/1977 dan KHI pasal 225, bahwa pada dasarnya terhadap tanah milik (benda)

¹¹⁵ Kompilasi Hukum Islam, hlm 104.

¹¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, hlm 104.

¹¹⁷ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, hlm 177-178.

yang telah di wakafkan tidak dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri agama, yaitu: karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf seperti di ikrarkan wakif dan karena kepentingan umum;¹¹⁸ dan ditambahkan dalam PP.No.28/1977 (3) perubahan tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus dilaporkan oleh nadzir kepada bupati/walikota/mayor kepala daerah, cq. Kepala direktorat agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.¹¹⁹ Kemudian ini secara lebih rinci diatur dalam peraturan menteri agama Nomor 1 tahun 1978 yang merupakan peraturan pelaksanaan PP. Nomor 28 tahun 1977 pasal 12.¹²⁰

2) Penyelesaian benda wakaf

Penyelesaian perselisihan benda wakaf Pasal 12 PP. No. 28/1977 menegaskan bahwa penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui pengadilan agama setempat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.¹²¹

Kemudian dalam pasal 226 KHI, menjelaskan bahwa penyelesaian terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya.

3) Pengawasan

Dalam pasal 13 PP. No.28/1977 dinyatakan: “pengawasan perwakafan tanah milik dan tata caranya di berbagai tingkat wilayah ditetapkan lebih lanjut oleh menteri agama”¹²² selanjutnya menindaklanjuti pasal 13 tersebut. Menteri agama melalui peraturan No.1 tahun 1978 pasal 14 menegaskan: “Pengawasan dan bimbingan perwakafan tanah dilakukan oleh unit-unit organisasi departemen agama secara Hierarkis sebagaimana diatur dalam keputusan menteri agama tentang susunan dan tata kerja departemen agama”.¹²³ Secara lebih rinci KHI menjelaskan: “pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nadzir dilakukan bersama sama oleh kepala kantor urusan agama kecamatan, majelis ulama kecamatan dan pengadilan agama yang mewakilinya.”¹²⁴ Yang menjadi pertanyaan dalam hal ini adalah keberadaan majelis ulama pada tingkat kecamatan yang sampai saat ini belum jelas eksistensinya.

¹¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, hlm 105.

¹¹⁹ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, hlm 179.

¹²⁰ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm 246-247.

¹²¹ Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, hlm 179.

¹²² Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, hlm 179.

¹²³ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm 247.

¹²⁴ Kompilasi Hukum Islam, hlm 107.

1. Pandangan Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Wakaf.

Umat Islam yang mayoritas di Indonesia di satu sisi dan kemerdekaan bangsa Indonesia yang direbut dari tangan Belanda di sisi lain telah melahirkan dualisme hukum di Indonesia. Sebab meskipun Indonesia mengakui dan menjalankan hukum warisan Belanda (hukum positif) sebagaimana termaktub dalam naskah kemerdekaan, namun bangsa Indonesia dalam realitasnya membutuhkan tuntunan dan peraturan dari hukum Islam.

Di Indonesia, setidaknya ada dua kelompok besar yang terlibat dalam pembahasan tentang pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Dua kelompok itu adalah kelompok yang menekankan pendekatan normatif (formalisme) dan kelompok yang menekankan pendekatan kultural (budaya). Kelompok pertama berpendapat bahwa Islam adalah lengkap, sehingga hukum Islam harus diterapkan kepada seluruh umat Islam untuk dilaksanakan dalam seluruh kehidupan sehari-hari. Sedangkan kelompok kedua berpandangan pentingnya penyerapan nilai-nilai hukum Islam ke dalam masyarakat.¹²⁵

Oleh karena dalam perkembangan hukum di Indonesia jelas mengacu kepada nilai-nilai ajaran Islam yang disesuaikan dengan budaya dan tradisi bangsa Indonesia, khususnya dalam masalah perwakafan. Wakaf secara hukum yang terdapat dalam fiqh klasik dengan mengikuti mazhab fiqh yang empat (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal) terdapat perbedaan dengan pola hukum Islam gaya Indonesia yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam (KHI) Indonesia.¹²⁶

Wakaf dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 215 ayat (1) dijelaskan dengan redaksi: "Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam".

Perwakafan yang terdapat dalam KHI sebagian besar pasal-pasalunya mempunyai kemiripan dengan apa yang telah diatur dalam PP. No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, hanya saja PP No. 28 tahun 1977 terbatas pada perwakafan tanah milik sedangkan dalam KHI memuat tentang perwakafan secara umum. Wakaf yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam tidak terbatas hanya pada tanah milik, tetapi mencakup benda bergerak dan benda tidak bergerak yang mempunyai daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut Islam. Pasal 215 ayat (4). Disyaratkannya harta wakaf yang memiliki daya tahan lama dan bernilai agar benda wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak hanya sekali pakai. Demikian pula karena watak wakaf yang lebih mementingkan manfaat benda tersebut, yaitu untuk mengekalkan pahala wakaf meskipun orang yang berwakaf sudah meninggal. Demikian pula benda

¹²⁵ Mahsun, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Melalui Integrasi Metode Klasik Dengan Metode Saintifik Modern*, Al-Ahkam, Volume 25, Nomor 1, April 2015, hlm 10-11. Diakses dari laman <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/4/72>.

¹²⁶ Kementerian Agama RI Dirjen Binmas, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), hlm 31.

wakaf ini dapat berupa benda yang dimiliki baik oleh perorangan maupun kelompok atau suatu Badan Hukum dan harus benar-benar kepunyaan yang berwakaf (*waqif*).¹²⁷

Dalam buku-buku klasik yang ditulis oleh para ulama' dari berbagai penganut mazhab menyatakan bahwa, ada dua model wakaf. pertama, ialah wakaf *khairi* (umum), ialah mewakafkan sesuatu yang manfaatnya untuk kepentingan umum tanpa di tentukan. Kedua wakaf *ahli* (keluarga), ialah mewakafkan sesuatu yang manfaatnya untuk kepentingan tertentu atau keluarga. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) hanya terdapat wakaf *khairi* (umum) dan tidak memperbolehkan wakaf *ahli*. Hal tersebut merupakan perbedaan yang di pengaruhi oleh pengalaman sejarah dalam praktek wakaf. Ketika umat Islam menggalakkan gerakan wakaf dan mendapat sambutan baik dari kalangan muslimin karena termotivasi dengan semangat kebersamaan dan emosi keagamaan, maka masyarakat muslim mengalami kejayaan dalam bidang ekonomi dan sejahtera, tetapi efek buruknya adalah umat Islam lemah etos kerjanya dan mereka enggan berkreasi karena secara ekonomi mereka dijamin oleh hasil dana wakaf *ahli* (keluarga). Dan pada saat itu pula kalangan ulama dan pemikir hukum Islam melakukan ijtihad bersama (*ijtihad jama'iy*) untuk melarang praktek wakaf *ahli* di negara muslim mengingat eksese negatifnya. Berdasarkan pertimbangan kepentingan publik (*maslahah al 'ammah*) KHI tidak mencamtukan wakaf *ahli* (keluarga).¹²⁸

Pendapat para ulama' dari berbagai ulama pengikut imam mazhab menjelaskan bahwa yang boleh menjadi *wakif* (yang memberi wakaf) adalah orang yang memiliki harta dan tidak dalam tanggungan, seperti hutang atau gadai, dan tidak menyebutkan badan hukum. Akan tetapi menurut KHI yang menjadi *waqif* bisa berupa badan hukum atau orang yang memiliki hak penuh terhadap harta yang diwakafkan. Sebab menurut KHI Badan Hukum mempunyai hak penuh terhadap suatu harta sebagaimana orang yang memiliki harta. Hal tersebut dapat dilihat dari hukum perundang-undangan Indonesia yang mayoritas masih meneruskan hukum warisan Belanda yang lama menjajah Indonesia.

Nazhir (pengelola) wakaf dalam KHI harus warga negara Indonesia dan tinggal di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan. Hal ini wajar mengingat sistem administrasi Indonesia agar lebih teratur dan lebih mudah dipantau serta mudah diselesaikan secara hukum jika suatu waktu terjadi sengketa. Barbeda halnya dengan nazdir wakaf menurut para ulama mazhab yang sama sekali tidak mensyaratkan hal tersebut, tetapi lebih kepada faktor ikhlas dan tidak mensyaratkan secara administratif dan jarak pengelola denga harta wakaf yang dikelola. Selain perbedaan tersebut juga dalam pendapat ulama mazhab tidak menyebut Nazhir terdiri dari Badan Hukum tertentu. Sebab badan hukum menurutnya bukan orang yang dapat mengelola tetapi fungsionaris di dalamnya yang mengelola. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam memperbolehkan badan hukum, seperti yayasan dan lembaga untuk mengelola harta

¹²⁷ Kementerian Agama RI Dirjen Binmas, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, hlm 32.

¹²⁸ Kementerian Agama RI Dirjen Binmas, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, hlm. 32-33.

wakaf. Meskipun sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan mengingat Badan Hukum yang menjadi Nazhir wakaf pada hakikatnya adalah para pengurus Badan Hukum tersebut yang mengelolanya. Hal tersebut dapat dimaklumi mengingat hukum di Indonesia yang mengatur dan memperbolehkan wakaf untuk dilembagakan, baik yang memberikan wakaf (*waqif*) maupun secara pengelolaannya (Nazhir). Sedangkan dalam pendapat ulama fiqh tidak mengenal wakaf yang dilembagakan.

Dalam pendapat ulama tidak terdapat persyaratan yang mengharuskan bagi yang memberi wakaf harus disaksikan oleh minimal dua orang dan dicatat secara administratif. Sebab dalam Islam menganggap harta yang diwakafkan sepenuhnya adalah milik Allah swt dan yang memberi wakaf sepenuhnya adalah semata-mata demi mengharap ridha Allah swt., maka sesuatu yang diwakafkan tidak ada sesuatu yang menjadi hak *waqif* dan sepenuhnya adalah milik Allah swt. Berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 218 yang menyatakan, “bahwa pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nazdir dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang”. Menurut KHI, hal ini menunjukkan keterkaitan harta wakaf dengan sengketa dan penyelesaian secara hukum positif di Indonesia.¹²⁹

Dalam pendapat ulama mazhab menjelaskan bahwa pelaksanaan perwakafan tidak terikat dengan birokrasi atau administrasi. Sebab harta yang diwakafkan sepenuhnya milik Allah swt. Jika Nazhir telah memenuhi syarat dan demi kebaikan umum, maka pelaksanaanya pun tidak terikat dengan orang lain dan sepenuhnya merupakan ijtihad Nazhir yang sesuai dengan tuntunan Islam. Berbeda halnya pelaksanaan harta wakaf menurut KHI yang mensyaratkan bahwa harta wakaf harus didaftarkan kepada pejabat yang berwenang. Dalam pasal 224 menyebutkan “fungsi pendaftaran benda wakaf ini pada prinsipnya adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan jaminan mengenai benda yang diwakafkan”. Hal tersebut dapat dimaklumi karena memang perbedaan dasar (dalil/argumen) antara ulama mazhab dengan para penyusun KHI. Ulama mazhab berdasarkan perilaku Nabi Muhammad saw dan para sahabat serta prakteknyapun berlandaskan hukum Islam. Sedangkan KHI adalah mempraktekkan hukum Islam berdasarkan ajaran Nabi Muhammad saw dan prakteknya harus disesuaikan dengan hukum positif di Indonesia.¹³⁰

¹²⁹ Kementerian Agama RI Dirjen Binmas, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, hlm 33-34.

¹³⁰ Kementerian Agama RI Dirjen Binmas, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, hlm 35.

BAB IV

ANALISIS PASAL 218 AYAT 1 (SATU) KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG SERTIFIKASI AKTA IKRAR WAKAF DAN SAKSI WAKAF PERSPEKTIF *MAQASID ASY-SYARIAH*.

A. Urgensi Sertifikasi Akta Dan Saksi Ikrar Wakaf Dalam Pasal 218 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan ulasan penulis dalam bab sebelumnya, mengenai masalah perwakafan di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mengatur masalah tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam. Peraturan ini memberikan legalitas agar tanah wakaf bebas dari ikatan, sitaan, persengketaan dan juga dapat terjamin fungsinya dan kemanfaatannya, sesuai dengan hakikat dan tujuan dari wakif atau yang mewakafkan tanahnya.

Dalam analisa penulis dalam Pasal 218 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut.

Penjelasan pasal 218 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menurut hemat penulis bersifat memberikan kepastian hukum karena didalam aturannya wakaf yang dilakukan tidak cukup dengan akad wakaf yang dilakukakn secara lisan saja tetapi KHI mengharuskan wakaf dilakukan secara lisan dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf dan tertulis dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk selanjutnya dibuat akta ikrar wakaf. Selain itu dikuatkan dengan adanya saksi memberikan kejelasan kepada petugas pencatat akta ikrar wakaf mengenai seluk beluk benda wakaf memang benar-benar benda yang baik terhindar dari hal maksiat atau sengketa sebelumnya, dengan adanya saksi juga memberikan kekuatan dalam pembuktian jikalau dikemudian hari terdapat sengketa.

Dengan mendasarkan pada kata ikrar wakaf maka tanah atau benda yang semula hak milik dari wakif (orang yang mewakafkan) diajukan perubahannya ke Badan Pertanahan Nasional atau ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) setelah memenuhi syarat administrasinya untuk diubah menjadi sertifikat wakaf.

Hukum Islam memandang bahwa perwakafan telah terjadi seketika itu juga dengan adanya pernyataan wakif yang merupakan ijab, karena perbuatan wakaf dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak. Namun, secara hukum positif pelaksanaan wakaf harus dilakukan dengan ikrar yang dilakukan di hadapan pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan dua orang saksi serta harus dibuat dalm bentuk Akta Ikrar Wakaf.

Pada bab sebelumnya penulis memaparkan bahwa pada praktiknya wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum keadaan demikian, tidak hanya karena

kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi juga karena jika masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Dari kejadian dimasyarakat yang demikian, maka penulis berasumsi memang adanya ketentuan pasal 218 ayat (1) KHI bisa menjadi benteng dari perbuatan yang dapat merusak esensi dari wakaf.

Dalam perluasan akibat dari adanya ketentuan pasal 218 ayat (1) KHI, penulis menyandingkan cara penyelesaian sengketa perwakafan di dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun apabila penyelesaian sengketa tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau Pengadilan Agama. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama, yang menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Adanya sertifikasi wakaf menjadi sangatlah urgent karena seiring berjalannya waktu seperti munculnya ketentuan perundang-undangan yang menyatakan bahwa ketika tidak mencapai mufakat maka penyelesaian sengketa wakaf diselesaikan melalui meja hijau. Khususnya penyelesaian sengketa wakaf melalui persidangan di pengadilan Agama, Hakim dalam memutuskan perkara untuk menetapkan siapa yang menang dan siapa yang dikalahkan diperbolehkan berdasar pada keyakinannya. Akan tetapi, meski keyakinan hakim tersebut terhitung sangat kuat dan sangat murni, keyakinan hakim tetap harus berdasar pada alat bukti yang ada. Karena alasan ini, pembuktian dikategorikan menempati posisi sentral atau penting dalam proses persidangan di pengadilan. Pada penyelesaian perkara wakaf di pengadilan, akta ikrar wakaf dapat digolongkan sebagai salah satu alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil dalam penyelesaian perkara perwakafan. Oleh karena itu, maka perlu adanya data yang nyata dan lengkap mengenai urgensi alat bukti ikrar wakaf dalam penyelesaian perkara wakaf.¹³¹

Ikrar wakaf wajib dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf untuk mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf yang disebabkan tidak jelasnya status dan kedudukan tanahnya, baik antara wakif dengan nadzir ataupun antara keluarga wakif dengan umat Islam setempat dengan nadzirnya. Disamping itu untuk mencegah terjadinya sengketa dalam kasus dimana setelah wakif meninggal dunia, sebagian ahli warisnya menolak dan tidak mengakui bahwa benda yang dimaksud adalah benda wakaf.

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan dibuatnya Akta Ikrar Wakaf, maka perwakafan tersebut akan terbukti autentik dalam akta yang akan dapat melindungi dan menjamin kesinambungan, kelestarian dan kelanggengan eksistensi wakaf itu sendiri, yang dapat dipergunakan dalam berbagai persoalan. Namun pada kenyataannya

¹³¹ Samsidar, Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan, hlm 2-3.

masih terdapat pelaksanaan wakaf yang dilakukan hanya memenuhi syarat sahnya wakaf menurut hukum Islam tanpa Pembuatan Akta Ikrar Wakaf.¹³²

Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa alat bukti ikrar wakaf sangatlah urgen dalam penyelesaian sengketa wakaf di pengadilan karena dari segi kekuatan akta ikrar wakaf digolongkan pada pembuktian alat bukti akta autentik sehingga hakim dapat menilai benar atau tidaknya suatu peristiwa hukum dengan alasan adanya alat bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dalam proses persidangan dan alat bukti ikrar wakaf merupakan alat bukti yang sah dalam menjelaskan atau menerangkan suatu dalil-dalil hukum dalam persidangan.

Ketentuan Pasal 17 Undang-Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dapat dipahami bahwa tersirat dalam akta Ikrar Wakaf merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari tentang tanah yang diwakafkan. Sejalan dengan pasal 1868 KUHPdata. Dalam ketentuan pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa: “ Akta autentik adalah akta dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta semua orang yang mendapat hak dari padanya, tentang segala hak yang tersebut dalam akta itu, dan juga tentang yang tercantum dalam akta itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut teraKHIr ini hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu.”¹³³

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dalam menilai kekuatan akta ikrar wakaf sebagai alat bukti disamakan dengan kekuatan alat bukti akta autentik yaitu berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang terdapat di dalam akta ikrar wakaf tersebut merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Sehingga apabila salah satu dari kekuatan itu cacat maka mengakibatkan akta autentik tidak lagi mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.¹³⁴

Oleh karena itu agar terpenuhinya kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat pada akta autentik maka harus terpenuhi kekuatan pembuktian luar, kekuatan pembuktianformil dan kekuatan pembuktian materil. Alat bukti akta ikrar wakaf sangatlah urgen dalam penyelesaian sengketa wakaf di pengadilan karena dari segi kekuatan akat ikrar wakaf digolongkan pada pembuktian alat bukti akta otentik sehingga hakim dapat menilai benar atau tidaknya suatu peristiwa hukum dengan alasan alat bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dalam proses persidangan dan alat bukti akta ikrar wakaf merupakan alat bukti yang sah dalam menjelaskan atau menerangkan suatu dalil-dalil hukum dalam persidangan, sehingga nadzir dapat melindungi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh wakif.

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dalam bentuk sertifikasi akta ikrar wakaf mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan dibuatnya Akta Ikrar Wakaf, maka perwakafan

¹³² Diah Ayuningtyas Putri Sri Dewi, *Kekuatan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Wakaf atas Tanah di Bawah Tangan*, Semarang, 2010, hlm 16.

¹³³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cet. VI; (Jakarta: Sinar Grafik, 2007), hlm 475.

¹³⁴ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Cet. I; (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm 56.

tersebut akan terbukti autentik dalam akta yang akan dapat melindungi dan menjamin kesinambungan, kelestarian dan kelanggengan eksistensi wakaf itu sendiri, yang dapat dipergunakan dalam berbagai persoalan.¹³⁵

Adanya sertifikasi akta ikrar wakaf menurut hemat penulis memberikan beberapa manfaat bagi pewakafnya, yaitu: Pertama, supaya tertib administrasi dan memberikan informasi untuk menghindari dari persoalan hukum di kemudian hari dari ketidak-adanya bukti konkrit yang menunjukkan bahwa harta tersebut telah diwakafkan. Kedua, adanya kepuasan batin bagi pewakaf karena telah melaksanakan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Pewakaf menilai bahwa dirinya telah menjalankan sesuai dengan perintah penguasa. Ketiga, menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Tanah wakaf akan mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan orang-orang yang tidak bertanggung-jawab.

B. Sertifikasi dan saksi ikrar wakaf dalam pasal 218 ayat (1) kompilasi hukum Islam perspektif *maqashid asy-syari'ah*.

Kaitannya dengan tata cara dan pendaftaran wakaf, Islam tidak membahas hal tersebut secara eksplisit. Namun dalam masalah urusan muamalah, ada tuntutan al-Qur'an yang menganjurkan untuk menuliskan dan disaksikan dua orang saksi. Ayat dalam makna umum itu, juga berarti Islam menghendaki masalah wakaf dengan tertulis atau memakai administrasi serta saksi karena masalah wakaf juga termasuk muamalah yang sudah diatur Allah SWT. Jadi lahirnya pasal 218 ayat (1) kompilasi hukum Islam perspektif ini dapat dikatakan sebagai implementasi terhadap Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَنْخَسِ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun

¹³⁵ Diah Putri Sari Dewi Ayuningtyas, *Kekuatan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Wakaf atas Tanah di Bawah Tangan* (Semarang, 2010), hlm 16.

daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS Al-Baqarah ayat 282).¹³⁶

Firman Allah tersebut mengisyaratkan bahwa setiap melakukan perbuatan hukum dalam bidang muamalah untuk dicatatkan dengan catatan yang baik dan benar. Kewajiban melakukan sertifikasi dalam setiap bermuamalah bertujuan untuk menjaga harta benda dari penyelewengan, persengketaan atau kealpaan pada kemudian hari. Adapun dari pelaksanaan sertifikasi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis, di mana alat bukti tertulis memiliki kekuatan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan alat bukti lainnya dalam ranah hukum perdata. Oleh karena itu, dikarenakan wakaf juga merupakan salah satu perbuatan hukum dalam bidang muamalah, maka setiap malakukan wakaf juga harus didaftarkan dan dicatatkan ke Instansi terkait yang berwenang.

Dalam konsep *maqashid asy-syari'ah*, menjelaskan bahwa tujuan aKHIr hukum adalah satu, yaitu *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Baginya, yang dimaksud dengan *mashlahah* adalah *mashlahah* yang membicarakan substansi kehidupan manusia dan pencapaian apa yang dituntut oleh kualitas emosional dan intelektual secara mutlak.

Substansi kehidupan manusia tersebut penggolongannya dibagi menjadi tiga, yakni *dlaruriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. Dalam substansi tersebut, saksi ikrar wakaf menempatkan sebagai aspek *mashlahah mursalah* dapat memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan pelaksanaan perwakafan setelah dilakukan sertifikasi akta ikrar wakaf merupakan substansi yang kedua, yaitu aspek *hajiyyah*. Sebab kalau peran dari saksi yang memberikan *mashlahah* tersebut disingkirkan, maka akan banyak menimbulkan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya

Tujuan syari'ah secara substansial adalah terciptanya kemaslahatan umum (*public interest*) dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan umum itu bersifat dinamis dan fleksibel yang seiring dengan lajunya perkembangan zaman. Nilai-nilai dan tujuan syara' dengan pertimbangan kemaslahatan umum menjadi solusi alternatif terhadap kompleksitas permasalahan kehidupan manusia.

Tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu pada prinsipnya mengacu pada aspek perwujudan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Muatan maslahat itu mencakup

¹³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia

kemaslahatan hidup di dunia maupun kemaslahatan hidup di akhirat. Atas dasar ini, kemaslahatan bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam memberikan penilaian terhadap sesuatu itu baik atau buruk, tetapi lebih jauh dari itu ialah sesuatu yang baik secara rasional juga harus sesuai dengan tujuan syara'. Setiap hukum syariah pasti memiliki alasan (*illah*) dan juga ada tujuan (*maqashid*) pemberlakuannya, tujuan dan alasannya adalah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia.

Mengacu kepada kepentingan dan kualitas kemaslahatan itu, adanya sertifikasi akta ikrar wakaf dan saksi yang penulis korelasikan dengan prinsip *masalah mursalah*, yaitu :

- 1 *Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini berkaitan dengan lima kebutuhan pokok, yang disebut dengan *kulliyat al-khamsah*, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kelima unsur pokok di atas adalah bertentangan dengan tujuan syara'. Proses sertifikasi harta wakaf dengan disaksikan oleh saksi, merupakan wujud dalam rangka melindungi, memelihara dan melestarikan zat bendanya maupun manfaat dari harta benda wakaf.. Nadzir beserta pengurus lainnya telah dipercaya untuk menjalankan amanah menjaga harta wakaf, dalam arti akan ada kewajiban diri sendiri kepada Allah dalam pertanggungjawaban masing-masing, lalu menjaga diri untuk tetap menjalankan amanah tersebut sebaik mungkin dan seprofesional mungkin, membantu mengasah pengetahuan dan wawasan mengenai perwakafan yang ada di negara umat Islam terlebih Indonesia, menjaga keturunan dengan tidak memakan atau meminum dari sesuatu yang haram, atau menjaga kesucian hartanya agar terjaga pula keturunannya dari nafkah yang diberikan, dan yang teraKHir adalah menjaga harta dengan mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan wakaf seperti mengetahui tujuan wakif mewakafkan hartanya, dan mengetahui siapa saja peruntukan harta wakaf tersebut ditujukan.
- 2 *Hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya dibutuhkan dalam menyempurnakan lima kemaslahatan pokok tersebut yang berupa keringanan demi untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar (*basic need*) manusia. Jika dilihat dalam proses sertifikasi akta ikrar wakaf, merupakan suatu tujuan yang diutamakan dalam pengelolaan wakaf. Yang mana kemaslahatannya lebih banyak didapatkan oleh karena terjaminnya kepastian hukum dari Negara sehingga mencegah timbulnya sengketa dikemudian hari.
- 3 *Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap (komplementer) berupa keleluasaan yang dapat memberikan nilai plus bagi kemaslahatan sebelumnya. Kebutuhan dalam konteks ini perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Umpamanya dianjurkan memakan yang bergizi, berpakaian yang rapi, melaksanakan ibadah-ibadah sunnat, dan lain sebagainya.

Ditinjau dari dimensi cakupan kemaslahatan dapat mengklasifikasikan kepada dua hal yaitu;

- 1 *Maslahah 'ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak atau mayoritas umat.
- 2 *Maslahah khasshah*, yaitu kemaslahatan khusus yang berhubungan dengan kemaslahatan individual. Misalnya, kemaslahatan yang berkenaan dengan pemutusan hubungan status perkawinan terhadap seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).

Maslahat adalah memenuhi tujuan Allah Swt. yang ingin dicapai pada setiap makhlukNya. Tujuan tersebut ada 5 (lima) yaitu menjaga agama, jiwanya, akalanya, keturunannya, dan hartanya. Standarnya, setiap usaha yang bertujuan melindungi kelima *maqashid* ini, maka dari itu termasuk *maslahat* atau mendatangkan manfaat kepada umat manusia (*jalbu manfa'ah*) dan menghindarkan kemudharatan (*daf'u mafsadah*). Dan sebaliknya, setiap usaha yang bertujuan menghilangkan lima *maqashid* ini, maka termasuk *mudharat*.

a. *Hifdzu Din* (Memelihara Agama)

Tujuan dalam perlindungan terhadap agama ialah memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan seperti melaksanakan kewajiban terhadap Allah. Pada proses sertifikasi akta ikrar wakaf ini merupakan salah satu contoh dalam melestarikan dan menjaga perwakafan yang ada di Indonesia. Kewajiban nadzir yang tidak hanya bertanggung jawab pada kesejahteraan masyarakat sekitar tetapi juga memegang amanah kepada Allah dalam pengelolaan dan pengembangannya. Hal ini termasuk menjaga agama karena wakaf merupakan salah satu perintah Allah yang dibarengi kesadaran akan perwujudan keadilan sosial. Dan prinsip kepemilikan harta tidak dibenarkan jika hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja. Maka dari itu adanya nadzir beserta kepengurusan lainnya ialah untuk menjaga dan memelihara harta wakaf karena mereka juga dipercaya masyarakat untuk mampu mengembangkan harta wakaf tersebut menjadi lebih produktif atas dasar beriman kepada Allah.

b. *Hifdzu Nafs* (Memelihara Jiwa)

Dalam sertifikasi akta ikrar wakaf dan saksi merupakan salah satu cara untuk melindungi jiwa seperti halnya memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan dan minuman terhadap masyarakat. Dari adanya harta wakaf yang sudah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut apabila digunakan dalam kegiatan wakaf produktif yang menghasilkan bahan pokok pangan masyarakat mampu memenuhi sebagian kebutuhan *dharuriyat* yaitu seperti mempertahankan hidup begitu pula dengan pihak nadzir maupun kepengurusannya juga pasti ikut menjaga, memelihara dan mempertahankan jiwa dari hasil mengelola wakaf produktif itu sendiri. Dengan memelihara jiwa atau kehidupan, maka keberlangsungan wakaf pun akan terjaga karena adanya orang-orang maupun sebuah lembaga yang mengurus dan menjaga harta wakaf tersebut secara baik dan tentunya harus dalam keadaan sehat pula agar kewajibannya tidak terganggu ketika menjalankan amanah.

c. *Hifdzu Aql* (Memelihara Akal)

Memelihara akal merupakan tingkatan *dharuriyat* yang harus dijaga, dipelihara dan dikembangkan sebagaimana mestinya. Dengan adanya sertifikasi akta ikrar wakaf didalamnya dijelaskan peruntukannya secara detail sehingga dalam pengelolaannya sudah terencana dengan jelas dalam akta ikrar wakaf. Apabila harta wakaf tersebut salah satunya untuk kegiatan pendidikan maka ada kewajiban bagi nadzir beserta kepengurusan lainnya untuk mewujudkannya memelihara akal dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan karena segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau maslahat dalam rangka *jalbu manfa'ah* (mendatangkan manfaat kepada manusia). Tidak hanya mereka yang berkewajiban menjaga akal melainkan seluruh umat manusia. Dengan ilmu yang dimiliki oleh nadzir maupun kepengurusan lainnya dapat menjaga dan mengelola perwakafan yang ada yang sampai sekarang bisa berkembang lebih baik dari sebelumnya.

d. *Hifdzu Mal* (Memelihara Harta)

Islam mengajarkan kepada umatnya agar meletakkan persoalan harta (kekayaan dunia) dalam tinjauan yang relatif, yaitu harta yang dimiliki seseorang atau sebuah lembaga harus mempunyai kandungan nilai-nilai sosial (*humanistik*). Salah satu instrumen ekonomis yang berdimensi sosial ialah perwakafan tanah yang merupakan konsekuensi logis dari sistem kepemilikan dalam Islam. Sertifikasi akta ikrar wakaf dan adanya saksi sangat berperan besar dalam menjaga kelestarian harta wakaf. Dengan adanya hal tersebut akan menjadi pelindung dari hal-hal yang dapat menghilangkan harta wakaf, dengan adanya sertifikasi akta ikrar wakaf merupakan cara untuk melestarikan harta wakaf terhindar dari hal yang tidak diinginkan agar harta wakaf bisa terjaga dan berkembang menjadi lebih produktif.

Nadzir beserta kepengurusan lainnya memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga harta wakaf yang awal berupa tanah dan bisa lebih produktif dengan didirikannya bangunan pendidikan atau tempat untuk berwirausaha dan lain sebagainya. Sehingga hasil dari harta wakaf produktif itu pula akan dikembalikan kepada pengembangan harta wakaf itu sendiri. Artinya, segala sesuatu (harta benda) yang selama ini dimiliki oleh seseorang maupun sebuah lembaga, secara moral harus diyakini secara ideologis bahwa ada sebagian darinya menjadi hak bagi orang lain yaitu untuk kesejahteraan sesama, seperti fakir miskin, anak yatim piatu, atau untuk lembaga-lembaga sosial lainnya.

e. *Hifdzu Nasab* (Memelihara Keturunan)

Sertifikasi akta ikrar wakaf juga memberikan manfaat untuk kemajuan sumber daya manusia terlebih apabila tanah yang diwakafkan digunakan untuk pembangunan tempat pendidikan agar tercapai generasi yang memiliki ilmu dan akhlak yang baik. Dengan adanya sertifikasi sebagai bukti legal dari negara menjamin ketika bangunan diatasnya sebagai tempat pendidikan formal mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari karena

sudah jelas tertera dalam sertifikat akta ikrar wakaf tersebut mulai dari pemawakaf, nadzir, dan peruntukan tanah wakaf tersebut untuk apa saja.

Mashlahah adalah segala upaya dan kegiatan yang dimaksudkan untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang dan menjauhi kerusakan. Ukuran utama mashlahah adalah (1) tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran dalam al-Qur'an maupun al-Hadits, (2) kemashlahatan itu bersifat rasional dan pasti, (3) kemashlahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak.

Dengan kelima ukuran tersebut, terlihat jelas bahwa penggunaan sertifikasi akta ikrar wakaf dan saksi memberikan mashlahah tersendiri karena untuk mengetahui bahwa wakaf tersebut sudah diikrarkan dan diserahkan kepada nadzir untuk dikelola sebagaimana mestinya. Kemashlahatan yang diambil dari sertifikasi akta ikrar wakaf dan saksi sendiri tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran al-Qur'an maupun al-Sunnah, lalu bersifat rasional dan pasti karena telah diketahui ciri-ciri yang dapat dikategorikan sebagai saksi dalam wakaf, diantaranya adil, dewasa dan berakal. Kemudian kemashlahatan saksi dalam perwakafan itu menyangkut kepentingan banyak orang. Terlihat jelas ketika seseorang mengikrarkan wakaf lalu disaksikan oleh minimal dua orang saksi. Faktor terpenting disini saksi dapat menjelaskan dan memberitahukan kepada orang lainnya bahwa benda atau harta tersebut sudah berwakaf atau hal-hal lainnya, misalnya terjadi sebuah sengketa harta atau benda wakaf. Disinilah saksi mempunyai aspek mashlahah demi mewujudkan kemanfaatan masyarakat.

Saksi yang dengan kerelaannya menyampaikan kesaksiannya merupakan saksi yang baik dan kemashlahatan yang dibutuhkan umat manusia di setiap ruang dan waktu menjadi terabaikan jika tidak ada syari'at hukum yang berdasarkan mashlahah mursalah berkenaan dengan arti penting saksi atas ikrar wakaf yang setiap saat dibutuhkan sesuai dengan perkembangan zaman yang terus bergerak dinamis. Tentunya semakin berkembang, semakin kompleks pula masalah-masalah yang dihadapi dalam permasalahan wakaf, ketika tidak dilibatkan saksi, disamping memiliki peran sentral, juga aspek *mashlahah* bagi kepentingan masyarakat (umat).

Sehubungan dengan aspek mashlahah yang sifatnya umum, bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu peristiwa mengikrarkannya wakaf oleh pemilik kepada nadzir (pengelola wakaf) sebagai outputnya dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia yang benar-benar terwujud atau bisa menolak madharat, atau tidak hanya mendatangkan kemanfaatan bagi seorang atau beberapa orang saja. Karena itu hukum tidak bisa disyariatkan lantaran hanya membuahkan kemashlahatan secara khusus kepada pimpinan atau orang-orang tertentu dengan tidak menaruh perhatian kepada kemashlahatan umat. Dengan kata lain, kemashlahatan itu harus memberikan manfaat bagi seluruh umat, termasuk dalam memberikan persaksian atas ikrar wakaf, yang dapat menginformasikan atau memberitahukan kepada pihak ketiga selaku saksi bahwa telah terjadi ikrar wakaf dan bendanya dapat digunakan

untuk orang lain yang sifatnya makro, selain dapat bertindak sebagai saksi untuk menyatakan persaksiannya ketika di kemudian hari terdapat sengketa atau problem lainnya berkenaan dengan harta wakaf itu.

Wakaf sebagai suatu perbuatan hukum maka untuk pelaksanaannya diperlukan adanya suatu prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam pengaturan tentang wakaf, yakni dalam pasal 218 ayat (1) Kompilasi Hukum. Sebagaimana yang telah penulis bahas sebelumnya mengenai sertifikasi tanah wakaf. Bahwasanya dalam fiqh di antara para ulama tidak ada ketentuan yang mengharuskan didaftarkannya dan dicatatkannya tanah yang telah diwakafkan agar mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah wakaf itu sendiri. Meskipun dalam surah al-Baqarah ayat 282 mewajibkan setiap perbuatan muamalah untuk dicatatkan, dan tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai kewajiban sertifikasi harta wakaf. Namun menurut hemat penulis, ayat tersebut dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam hukum Islam untuk dilakukannya sertifikasi terhadap harta yang telah diwakafkan, termasuk juga wakaf tanah. Di samping itu, terdapat juga kaidah fiqh yang mendukung adanya pendaftaran dan sertifikasi dalam melakukan perbuatan wakaf, yakni: “menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan”.¹³⁷ Kaidah fiqh tersebut mengisyaratkan bahwa dengan dilakukannya pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf pada instansi yang berwenang akan menarik banyak kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan.

Maksud dari menolak timbulnya kerusakan yaitu tanah yang telah diwakafkan tersebut tidak akan dapat dipersengketakan oleh ahli waris ataupun oleh pihak lainnya, serta tanah wakaf juga tidak dapat dijual dan dialih fungsikan sesuka hati oleh para pengelola harta benda wakaf. Hal itu dapat dihindari apabila tanah yang diwakafkan dilakukan pendaftaran dan sertifikasi di instansi terkait yang mengurus mengenai sertifikasi wakaf sampai keluarnya sertifikat tanah wakaf. Sedangkan kemaslahatan yang lahir dari dilakukannya pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf adalah disamping dapat meminimalisir kerusakan yang disebutkan di atas, kemaslahatan lainnya yaitu sertifikat tanah wakaf tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis apabila dipersengketakan dikemudian hari selain menjadi alat perlindungan dan kepastian hukum bagi status tanah wakaf itu sendiri.

Kekuatan berlakunya sertifikat sangat penting dalam hal mengetahui kepemilikan atas tanah itu sendiri, serta dengan adanya sertifikat dapat secara langsung memberika kepastian hukum kepada pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat tanah tersebut. Manfaat lainnya dari sebuah sertifikat tanah adalah dapat berfungsi sebagai pencegah terjadinya sengketa atas tanah, hal ini dikarenakan sertifikat tanah dapat melindungi status tanah dari tindakan sewenang-wenang oleh siapapun yang hendak mempersengketakan tanah.¹³⁸ Tanah wakaf yang telah diikrarkan oleh wakif baik secara lisan maupun secara tulisan dan telah dimuatkan dalam AIW, namun tidak dilakukan pendaftaran oleh nazhir kepada kantor BPN sejatinya telah sah secara hukum Islam. Akan tetapi berdasarkan peraturan perundang-

¹³⁷ Muslih Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.

¹³⁸ Bachsan Mustafa, *Hukum Agraria dalam Persepektif*. (Bandung : Remaja Karya, 1988), hlm 58.

undangan wakaf tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hukum dari Negara apabila terjadinya sengketa atas tanah wakaf tersebut di kemudian hari. Tidak dilakukannya pendaftaran tanah wakaf oleh nazhir, secara otomatis berdampak pula pada hak dan kewajiban nazhir selaku pengelola yang bertanggung jawab atas tanah wakaf itu sendiri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan bahwa; “harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksudkan dalam AIW sesuai dengan peruntukannya”.

Diah Ayuningtyas mengatakan bahwa kedudukan AIW sangat penting bagi pihak-pihak yang hendak melakukan perbuatan wakaf. Pembuatan AIW mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan dibuatnya AIW, maka perwakafan tersebut terbukti autentik dalam akta yang akan dapat melindungi dan menjamin kesinambungan, kelestarian dan kelanggengan eksistensi wakaf itu sendiri, yang dapat dipergunakan dalam berbagai persoalan. Namun pada kenyataannya masih terdapat pelaksanaan wakaf yang dilakukan hanya memenuhi syarat sahnya wakaf menurut hukum Islam tanpa Pembuatan AIW.¹³⁹

Dalam konteks hukum syari'at, wakaf tanpa adanya pensertifikatan tetap sah apabila segala syarat dan rukun yang ditentukan dalam syari'at Islam terpenuhi dengan baik. Sertifikasi dan pensertifikatan wakaf hanyalah administrasi saja, bukan menjadi unsur yang menentukan sah atau tidaknya wakaf. Bahkan para fuqaha tidak mencantumkan nazhir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, hal ini karena mereka berpendapat bahwa itu merupakan ibadah tabarru' atau pemberian yang bersifat sunnah saja.¹⁴⁰ Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kedudukan nazhir merupakan suatu hal yang sangat penting dan sentral. Karena nazhir yang bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara tanah wakaf bahkan memberdayakannya.

Menurut jumhur ulama, akad wakaf bersifat mengikat. Dengan kata lain bila terpenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, konsekuensi yang muncul adalah wakif tidak dapat menarik kembali harta yang telah diwakafkan, tidak menjual maupun mewariskannya.¹⁴¹ Artinya benda wakaf menjadi hak umum yang dapat dipergunakan oleh masyarakat penerima wakaf. Dalam Pasal 6 UU Nomor 41 Tahun 2004 menentukan bahwa unsur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan wakaf adalah adanya wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Sedangkan sertifikat merupakan syarat administrasi yang harus dipenuhi supaya adanya bukti yang kuat yang menjelaskan tanah wakaf tersebut telah diwakafkan.

Dalam hukum Islam, sertifikat wakaf memang bukanlah suatu keharusan, namun melihat banyaknya persoalan yang muncul pasca meninggalnya pewakaf maka sudah saatnya tanah wakaf yang belum ada sertifikat untuk menguruskannya kepada BPN di

¹³⁹ Diah Putri Sari Dewi Ayuningtyas, *Kekuatan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Wakaf atas Tanah di Bawah Tangan* (Semarang, 2010), hlm 142.

¹⁴⁰ Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Kencana* (Jakarta: 2017), hlm. 304.

¹⁴¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivis Ekonomi*. (Jakarta: Grafindo Persada, 2015), hlm 224.

Kabupaten/Kota Masing-masing. Dalam Islam meski tanpa sertifikat wakaf tetap sah dan orang yang melakukannya mendapatkan pahala karena telah melaksanakan sebuah perintah yang dianjurkan oleh agama, karena dalam ajaran agama Islam wakaf dianggap sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan.

Namun bila wakaf yang tidak disertifikatkan akan menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Tujuan pokok dari hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Oleh karenanya, pengajuan sertifikat tanah wakaf menjadi salah satu hal yang sangat diperlukan untuk menghindar dari tindakan-tindakan yang membawa malapetaka bagi yang melakukannya.

Aturan hukum menjamin adanya kemaslahatan bagi manusia dalam berbagai hal dan tujuan hukum Islam adalah untuk memberikan kebaikan dan mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Untuk itulah dalam kajian fiqh terdapat sebuah konsep mashlahah mursalah yang bertujuan supaya hukum Islam dapat menghilangkan kemafsadatan. Menurut Imam al-Gazali yang dimaksud mashlahah dalam istilah syar'i adalah memelihara dan mewujudkan tujuan Syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Imam al-Gazali melanjutkan bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai masalah; sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai mafsadah; maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai masalah.¹⁴²

Salah satu tujuan yang diharapkan dari pembentukan hukum syara' sebagaimana yang dideskripsikan adalah memelihara harta. Begitu juga dengan pemeliharaan harta wakaf yang perlu dijaga supaya tidak adanya pihak-pihak tertentu yang mengambil kembali harta yang telah diwakafkan oleh para pewakaf dikarenakan tidak adanya sertifikat yang menjelaskan kepemilikan harta tersebut telah diwakafkan. Hal ini dikarenakan sertifikat tanah wakaf menjadi salah satu bukti bagi nazhir bila ada yang ingin mempersoalkan status tanah wakaf.

Permasalahan yang terjadi di masyarakat adalah mayoritas dari tanah yang telah diwakafkan tidak memiliki akta ikrar wakaf, sesuai yang dicantumkan didalam pasal 218 Kompilasi Hukum Islam, karena dalam asas retroaktif atau hukum tidak dapat berlaku surut yakni apabila suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat sebelum adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur namun dikemudian hari muncul suatu peraturan yang mengatur hal tersebut maka perbuatan tersebut tetap sah walaupun bertentangan dengan peraturan sekarang. Masyarakat hanya sekedar mewakafkan tanah mereka tanpa memperdulikan apakah tanah yang mereka wakafkan sudah sesuai dengan prosedur tata cara mewakafkan tanah melalui peraturan pemerintah yang dituangkan didalam undang-undang.

Tetapi didalam ketentuan pasal 218 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat dengan para ulama' fiqh yang tidak pernah mempersyaratkan adanya

¹⁴² Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Juz I. (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1997), hal. 416-417.

saksi, ulama' fiqih hanya menetapkan empat rukun wakaf diantaranya, pemberi wakaf (*waqif*), benda yang diwakafkan (*mauquf*), penerima wakaf (*mauquf 'alaih*), dan sighthat ijab dan qabul, mereka tidak menetapkan kesaksian dua orang saksi dan sertifikasi dari petugas pemerintah sebagai rukun dari wakaf.¹⁴³ Sebab dalam hukum Islam menganggap harta yang diwakafkan sepenuhnya adalah milik Allah dan memberi wakaf adalah semata-mata demi mengharap ridha Allah SWT. Berbeda halnya dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI. Pasal 218 KHI menyatakan bahwa: "pihak yang mengwakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi."¹⁴⁴ Khoirul Abror menyatakan bahwa pendapat para ulama madzhab menjelaskan bahwa pelaksanaan perwakafan tidak terikat dengan birokrasi atau administratif. Sebab harta yang diwakafkan sepenuhnya milik Allah. Jika Nazir telah memenuhi syarat dan demi kebaikan umum, maka pelaksanaannya tidak terikat dengan orang lain, sepenuhnya merupakan ijihad Nadzir yang sesuai dengan tuntunan Islam.¹⁴⁵

Menurut hemat penulis, wakaf tanpa adanya akta ikrar wakaf menurut penulis tetap sah selama telah memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan dalam hukum syara'. Sertifikasi aktat ikrar wakaf hanya merupakan ketentuan administrasi saja, bukan menjadi unsur yang menentukan sah atau tidaknya wakaf. Bahkan para fuqaha tidak mencantumkan nazhir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, hal ini karena mereka berpendapat bahwa itu merupakan ibadah tabarru' atau pemberian yang bersifat sunnah saja. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kedudukan nazhir merupakan suatu hal yang sangat penting dan sentral. Karena nazhir yang bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara tanah wakaf bahkan memberdayakannya. Menurut jumhur ulama, akad wakaf bersifat mengikat. Dengan kata lain bila terpenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, konsekuensi yang muncul adalah wakif tidak dapat menarik kembali harta yang telah diwakafkan, tidak menjual maupun mewariskannya.

Namun demikian, alangkah lebih baik wakaf dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan karena akan memberikan manfaat bagi pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf tersebut sesuai dengan ketentuan maslahat dalam *maqasyid-asyari'ah*. Kemudian bagaimana dengan pelaksanaan wakaf sebelum lahirnya ketentuan pasal 218 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dimana pelaksanaan wakaf hanya sebatas lisan tanpa adanya catatan tertulis seperti sekarang dalam akta ikrar wakaf, dalam hal ini penulis berpendapat bahwa hal itu tetap sah sepanjang sesuai dengan hukum syara' dan bagi pewakaf atau ahli warisnya dapat memperbarui di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf agar diterbitkan akta ikrar wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

¹⁴³ Edi Gunawan, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 12, Nomor 1, Desember 2015, hlm 21.

¹⁴⁴ Khoirul Abror, *Dinamika Perwakafan Dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim*, Al-'Adalah Vol. XII, No. 2 Desember 2014, hlm 8.

¹⁴⁵ Khoirul Abror, *Dinamika Perwakafan Dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim*, hlm 8.

undangan yang ada terlebih sesuai dengan ketentuan pasal 218 ayat (1) KHI.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dapat penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut:

Sertifikasi Akta Ikrar Wakaf dan saksi mempunyai arti yang sangat penting atau urgent, karena dengan dibuatnya Akta Ikrar Wakaf, maka perwakafan tersebut akan terbukti autentik dalam akta yang akan dapat melindungi dan menjamin kesinambungan, kelestarian dan kelanggengan eksistensi wakaf itu sendiri, yang dapat dipergunakan dalam berbagai persoalan. Dengan demikian adanya Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 218 ayat (1) yang mengatur mengenai sertifikasi akta ikrar wakaf, sangatlah dibutuhkan sebagai dasar yuridis yang diharapkan mampu melindungi agar tanah wakaf bebas dari ikatan, sitaan, persengketaan dan juga dapat terjamin fungsinya dan kemanfaatannya, sesuai dengan hakikat dan tujuan dari wakif atau yang mewakafkan tanahnya.

Adanya sertifikasi akta ikrar wakaf juga memberikan beberapa manfaat bagi pewakafnya, yaitu: Pertama, supaya tertib administrasi dan memberikan informasi untuk menghindari dari persoalan hukum di kemudian hari dari ketidak-adanya bukti konkrit yang menunjukkan bahwa harta tersebut telah diwakafkan. Kedua, adanya kepuasan batin bagi pewakaf karena telah melaksanakan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Pewakaf menilai bahwa dirinya telah menjalankan sesuai dengan perintah penguasa. Ketiga, menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Tanah wakaf akan mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan orang-orang yang tidak bertanggung-jawab.

Sertifikasi dan saksi ikrar wakaf dalam pasal 218 ayat (1) kompilasi hukum Islam sudah sesuai dengan *maqashid asy-syari'ah* karena didalamnya mengedapankan aspek dari *Maslahat* yaitu memenuhi tujuan Allah Swt. yang ingin dicapai pada setiap makhlukNya, mengambil *maslahat* berarti merealisasikan *maqashid asy-syari'ah*. Adanya sertifikasi akta ikrar wakaf dan saksi akan mewujudkan daripada tujuan hukum itu sendiri. Sertifikasi akta ikrar wakaf dan adanya saksi sangat berperan besar dalam menjaga kelestarian harta wakaf (*Hifdzul Mal*). Dengan adanya hal tersebut akan menjadi pelindung dari hal-hal yang dapat menghilangkan harta wakaf, dengan adanya sertifikasi akta ikrar wakaf merupakan cara untuk melestarikan harta wakaf terhindar dari hal yang tidak diinginkan agar harta wakaf bisa terjaga dan berkembang menjadi lebih produktif.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai sertifikasi akta ikrar wakaf perlu disosialisasikan lebih luas kepada masyarakat, terlebih bagi masyarakat yang telah melakukan wakaf sebelum lahirnya aturan dalam Pasal 218 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam untuk segera memperbarui atau meminta akta ikrar wakaf kepada pejabat pembuat akta ikrar wakaf.
2. Meskipun pelaksanaan wakaf tanpa adanya akta ikrar wakaf sesuai dengan hukum Islam tetap sah, namun lebih baik masyarakat perlu melakukan sertifikasi akta ikrar wakaf dan saksi sebagai upaya tertib administrasi demi menjaga kelestarian, kesinambungan harta wakaf agar tetap aman dan bermanfaat bagi masyarakat luas dan terhindar dari sengketa dikemudian hari.

A. Penutup

Demikian penelitian skripsi yang dapat penulis uraikan, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi oleh penulis. Untuk itu mohon kritik dan sarannya demi kebaikan penelitian penulis kedepannya sehingga dapat bermanfaat bagi penulis dan kepada perkembangan dunia akademisi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. III. Jakarta: CV.Akademika Pressindo. 2001.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Ed. I. Cet. I. Jakarta: Akademika Pressindo. 1992.
- Abidin Abubakar, Zainal. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Cet. III Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993.
- Abu Bakr al-Dimyati, Sayid. *I'ânatu al-Talibin*, j-3, cet-4, Beirut-Libanon: *Ihyâ' alTurâşal-Araby*. Agama RI, Departemen . *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam. 2007.
- Agama RI, Departemen .*Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam. 2008.
- Agama RI, Departemen. *Peraturan Perundangan Perwakafan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta: Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2006.
- Agama RI, Kementerian. *Pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf. 2014.
- Arba, *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika. 2015.
- Ayuningtyas Putri Sri Dewi, Diah. *Kekuatan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Wakaf atas Tanah di Bawah Tangan*. Semarang. 2010.
- B Miles, Mattew dan Hubernan A. Michael. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press. 1992.
- Bekker, Anton dan Achmad Charis Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Kansisus. Yogyakarta. 1990.
- Daud Ali, Mohammad. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta : UI-Press. 1988.
- Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 11. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Effendi M. Zein, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Ed. I, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2004.
- Fathuddin Yusuf, Agus . *Melacak Bondo Masjid yang Hilang*. Semarang: Aneka Ilmu. 2001.
- Gani Abdullah, Abdul. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press. 1994.
- Gunawan, Edi. *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, jurnal IAIN Manado*.
- Hadi. Sutrisno. *Metodologi research I*, cet 25. Yogyakarta : Andi Offset. 1997.
- Halim, Abdul . *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press. 2005.
- Hamid Muhammad al-Gazali, Abu . *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, Juz I. Beirut: Mu'assasat al-Risalah. 1997.

- Hasan Bisri, Cik. *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. I .Jakarta: PT. LogosWacana Ilmu, 1999.
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Bina Aksara. 1993.
- Huda, Nurul dan Muhamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Ismanto, Kuart . *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2016.
- Jaya Bakri, Asafri . *Konsep Maqasid asy-Syariah Menurut al-Syatibi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 1996.
- Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Direktorat. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta. 2003.
- K. Lubis, Suhrawardi Dkk, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Lutfi, Mukhtar. *Evaluasi Sistem Pengelolaan Wakaf di Kota Makassar*. Makassar : alaaddin university press. 2014.
- Manan, Abdul. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Kencana (Jakarta: 2017)
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia; Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi dan Yurisprudensi*. Ed. I, Cet. 2. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta. Jakarta: 2004.
- Mukri, Moh. *Aplikasi Konsep Maslahah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta. 2012.
- Mukri, Moh. *Paradigma Maslahah dalam Pemikiran Al-Ghazali*, Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press. 2011.
- Munir SA, HM. *Wakaf Tanah menurut Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. Pekanbaru: UIR Pres Pekanbaru. 1991.
- Muslim bin al-Hajaj al-Qusyarri, Imam. *Sahih Muslim*. Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- Mustafa, Bachsan . *Hukum Agraria dalam Persepektif*. Bandung : Remaja Karya,; 1988.
- Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 1998.
- Pendidikan Nasional, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa Edisi ke Empat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif, terj, oleh Muhyiddin Mas Rida, Cet I*. Jakarta: Khalifa. 2004.
- Qayyim al-Jauziyyah, Ibn. *Ilam al-Muwaqqiin an Rabb al-Alamin*. Kairo: Dar al Hadith. 2006. Juz II.
- Rahman, Fazlur. *Health and Medicine in the Islamic Tradition: Change and Identity*. Cet 1. Bandung: Penerbit Mizan. 1999.
- Rofiq, Ahmad . *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. II. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1977.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I . Yogyakarta: Gema Media, 2001.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivis Ekonomi*. Jakarta: Grafindo Persada. 2015.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2015.

- Rusydi, M., Mughits, Abdul (Eds). (2008). *Filsafat Ekonomi Islam*. Cet. Ke-satu. Yogyakarta: Forum Studi Ekonomi Islam, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga,
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr.
- Samsidar. *Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan*.
- Sasangka, Hari. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Cet. I .Bandung: Mandar Maju. 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). 2007.
- Suhairi , *Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Kaukaba. 2014.
- Suharmadi dan Muhda Hadisaputra dan Amidhan, *Pedoman Praktis Perwakafan*. Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid. 1990.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik* . Bandung : Transito. 1998.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2018.
- Usma, Suparman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Darul Ulum Press. 1994.
- Usman, Muslih. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika. 2009.
- Wahab Khalaf, Abdul. *Ushul Fiqh*. Kairo: Darul ‘ilmi, 1978.
- Wasit Aulawi, HA. *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah. 1989.
- Yahya Harahap, M. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Cet. VI. Jakarta: Sinar Grafik, 2007.
- Yahya Harahap, M. *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: CV. Logos Wacana Ilmu. 1999.

Jurnal

- Abror, Khoirul. *Dinamika Perwakafan Dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Negara-Negara Muslim*, Al-'Adalah Vol. XII, No. 2 Desember 2014.
- Arifin, Bustanul. *Kompilasi : Fiqih dalam Bahasa Undang-undang*. Pesantren, No. 2 Vol. II, 1985.
- Basran, Masrani. *Kompilasi Hukum Islam*, Mimbar Ulama No. 105. 1986.
- Basry, Hasan. *Perlunya Kompilasi Hukum Islam*. Mimbar Ulama No. 104 th. X April 1986.
- Eva, Muzlifah. *Maqashid Syari'ah Sebagai Paradigma Ekonomi Islam*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, ISSN: 2088-6365 Vol. 3. No. 2. 2013.
- Gunawan, Edi. *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika. Vol. 12. Nomor 1. Desember 2015.

- Mahsun, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Melalui Integrasi Metode Klasik Dengan Metode Sainifik Modern*, Al-Ahkam, Volume 25, Nomor 1, April 2015, hlm 10-11. Diakses dari laman <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/4/72>.
- Sadzali, Munawir. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, dalam Mufti AM, Pembaharuan Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Manado: Jurnal al-Syir'ah. 2005
- Shidiq, Ghofar. *Teori Maqashid Al'Syariah dalam Hukum Islam*. Jurnal : Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009.
- Toruquddin, Moh. *Teori Maqasid asy-Syariah Perspektif Ibnu Ashur* (Jurnal).

LAMPIRAN

BUKU KETIGA HUKUM PERWAKAFAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 215

Yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
2. Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakfkan benda miliknya.
3. Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.
4. Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
5. Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petugaspemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.
7. Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

BAB II FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF

Bagian Kesatu

Fungsi Wakaf

Pasal 216

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Bagian Kedua

Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf

Pasal 217

- (1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
- (3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Pasal 218

- (1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Pasal 219

- (1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. sudah dewasa;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak berada di bawah pengampunan;
 - f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
- (2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
 - b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.
- (3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.

- (4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:
- "Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga".
 - "Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".
 - "Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya".
- (5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Hak-hak Nadzir
Pasal 220

»

- (1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- (2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Pasal 221

- (1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permohonan sendiri;

- c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;
 - d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.
- (2) Bilamana terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

Pasal 222

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

BAB III

TATA CARA PERWAKAFAN DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu

Tata Cara Perwakafan

Pasal 223

- (1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- (2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
 - a. tanda bukti pemilikan harta benda;
 - b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
 - c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pendaftaran Benda Wakaf

Pasal 224

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan

mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

BAB IV

PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN PENGAWASAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu

Perubahan Benda Wakaf

Pasal 225

- (1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:
 - a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
 - b. karena kepentingan umum.

Bagian Kedua

Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf

Pasal 226

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 227

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang mewilayahinya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 228

Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 229

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

BIOGRAFI

I. IDENTITAS DIRI

Nama : Muhammad Sahal Mahfud
 Tempat Tanggal Lahir : Demak, 13 Desember 1997
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Alamat : Dukuh Karangpacing RT 01 RW 11 Kelurahan Rejosari
 Kec. Karangawen Kab. Demak
 Nomor HP. : 085 951 616 175
 Email : Sahalmahfud170@gmail.com

II. PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2002-2003 : TK Tarbiyyatul Atfal
 Tahun 2003-2009 : SD N Tlogorejo I
 Tahun 2009-2012 : Mts N Karangawen
 Tahun 2012-2015 : SMK N 1 Karangawen
 Tahun 2015-sekarang : Prodi Hukum Keluarga Islam FSH UIN Walisongo Semarang.

III. PENDIDIKAN NON FORMAL

Tahun 2003-2007 : Madrasah Diniyah Futuhiyyah 1 Dukuh Karangpacing.

IV. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Sekertaris Devisi Rumah Tangga UKM WSC Tahun 2016.
2. Ketua Devisi Rumah Tangga UKM WSC Tahun 2017.
3. Ketua Devisi Futsal UKM WSC Tahun 2018.
4. Wakil Ketua Umum UKM WSC Tahun 2019.
5. Bendahara Devisi Futsal UKM WSC 2020.